

ANALISA

1980 — 1

**Berbagai
ASALAH EKONOMI
INTERNASIONAL**



FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES



ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

Pemimpin Redaksi/

Penanggung jawab : Kirdi DIPOYUDO

Dewan Redaksi : Daoed JOESOEF, Rufinus LAHUR,
J. PANGLAYKIM, A.M.W. PRANARKA, M. Hadi SOESASTRO, B. SUNARIO, Harry TJAN SILALAH dan Jusuf WANANDI

Redaksi Pelaksana : Kirdi DIPOYUDO, B. SUNARIO

STT : S.K. Menpen R.I. No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978, tgl. 28—8—1978
ISSN 0126 - 222X

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat,
Telepon 356532-5

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13,
Jakarta Pusat, Telepon 349489

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

PENGANTAR REDAKSI	3
BEBERAPA PANDANGAN MENGENAI PERKEMBANGAN NILAI DOLAR AMERIKA	
<i>J. PANGLAYKIM</i>	5
BENARKAH SISTEM NILAI TUKAR MENGAMBANG SEDANG DIUJI?	
<i>N. ARSJAD</i>	20
HUBUNGAN-HUBUNGAN EEKONOMI INDONESIA- AMERIKA SERIKAT	
<i>R.B. SUHARTONO</i>	40
MULTINATIONAL CORPORATION: BISNIS INTERNASIONAL DAN ASEAN	
<i>J. PANGLAYKIM</i>	49
KERAWANAN SUPLAI MINYAK NEGARA-NEGARA BARAT	81

Masih tersedia Buku-buku terbitan CSIS:

1. Dua Pemikiran tentang Pertahanan Keamanan dan Strategi Nasional, Daed JOESOEF a Rp. 1.500,—
2. Economic Development and National Resilience, R.B. SOEHARTONO a Rp. 500,—
3. Persoalan Masa Kini: Perusahaan-perusahaan Multinasional, J. PANGLAYKIM a Rp. .
4. Strategi Politik Nasional, Ali MOERTOPO a Rp. 1.250,—
5. Business Relations between Indonesia and Japan, J. PANGLAYKIM a Rp. 500,—
6. Indonesia dan Dunia Internasional 1974 a Rp. 1.750,—
7. Trends in Marketing, J. PANGLAYKIM a Rp. 1.000,—
8. Buruh dan Tani dalam Pembangunan, Ali MOERTOPO a Rp. 400,—
9. Seminar Strategi Pembinaan Pengusaha Swasta Nasional a Rp. 2.000,—
10. Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila (edisi luks) a Rp. 1.200,—
11. Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila (edisi biasa) a Rp. 350,—
12. Self Reliance and National Resilience a Rp. 1.250,—
13. Second Indonesian — Japanese Conference a Rp. 1.500,—
14. Indonesia dan Dunia Internasional 1975 a Rp. 4.000,—
15. Indonesia dan Dunia Internasional 1976 a Rp. 5.000,—
16. Japan — Indonesia Relations in the Context of Regionalism in Asia a Rp. 1.500,—
17. Indonesia's Economic and Business Relations with ASEAN and Japan, J. PANGLAYKIM a Rp. 3.000,—
18. Timur Tengah dalam Pergolakan, Kirdi DIPOYUDO a Rp. 1.500,—
19. Afrika dalam Pergolakan, Kirdi DIPOYUDO a Rp. 1.500,—
20. Southeast Asia and the World of Tomorrow a Rp. 3.000,—
21. Strategi Kebudayaan, Ali MOERTOPO a Rp. 750,—
22. Indonesia dan Dunia Internasional 1977 a Rp. 5.000,—
23. P-4 and GBHN (bahasa Inggris) a Rp. 600,—
24. Japan — Indonesia Cooperation: Problems and Prospects a Rp. 1.500,—
25. ASEAN dalam Berita, Harapan dan Kenyataan 1967-1977 a Rp. 4.500,—
26. Situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir Bagian 1 (Permasalahan), Onny S. PRIJONO dan A.M.W. PRANARKA a Rp. 1.750,—
27. Indonesia dan Dunia Internasional 1978 a Rp. 5.000,—
28. Pancasila Arti dan Pelaksanaannya, Kirdi DIPOYUDO a Rp. 900,—
29. Dasar-dasar Pendidikan, Mohammad S JAFI a Rp. 1.500,—
30. Emerging Enterprises in the Asia Pacific Region, J. PANGLAYKIM a Rp. 1.500,—
31. Security Dimensions of the Asia Pacific Region in the 1980's, Jusuf WANANDI a Rp. 1.500,—
32. Japan — Indonesia Relations: Past, Present, Future a Rp. 2.000,—
33. Indonesia and Korea: The Next Decade a Rp. 1.750,—

Pesanan luar kota ditambah ongkos kirim 15%; pembayaran di muka, dialamatkan ke: CSIS, Biro Publikasi, Jalan Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, telepon 349489.

PENGANTAR REDAKSI

Dunia perdagangan dan ekonomi internasional pada permulaan dasawarsa ini dikejutkan oleh melonjaknya harga emas di pasaran bebas di Eropa Barat dan Asia Timur. Kenaikan harga emas yang tajam ini sebetulnya sudah terlihat dalam tahun yang baru lalu. Juga harga minyak bumi, meskipun atau justru, sebab tidak ditetapkan pada sidang OPEC yang terakhir, menanjak terus. Kenaikan harga emas dan minyak bumi ini kerap disertai dengan kemerosotan nilai tukar Dollar Amerika terhadap beberapa mata uang Eropa Barat, sehingga timbullah pertanyaan akan Dollar Amerika sebagai pembayaran perdagangan internasional dan akan perkembangan Dollar ini selanjutnya. Erat hubungannya dengan pertanyaan ini ialah permasalahan mengenai tata ekonomi internasional yang diikuti dalam dasawarsa terakhir dan sistem nilai tukar mata uang internasional. Dalam dasawarsa yang baru lewat orang mulai menggunakan dan memuji sistem tukar mengambang sebagai salah satu jalan keluar mengatasi krisis ekonomi dunia perdagangan bebas.

Masalah-masalah ekonomi internasional ini dan hubungannya dengan ASEAN pada umumnya dan Indonesia pada khususnya menjadi tema Analisa edisi ini. Karangan pertama mengajukan beberapa pandangan mengenai perkembangan nilai Dollar Amerika. Perkembangan nilai Dollar Amerika ini memang mempunyai pengaruh atas perkembangan ekonomi internasional. Di lain pihak menurunnya nilai tukar Dollar ini dipengaruhi oleh sistem tukar antar mata uang di perdagangan internasional.

Dalam karangan kedua N. Arsjad membahas sistem nilai tukar yang pada dasawarsa yang baru lewat sudah umum dipergunakan di dunia perdagangan Barat, dan sejak Kenop 15 juga dipakai di Indonesia, yakni sistem nilai tukar mengambang.

Hubungan-hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat dikemukakan oleh R.B. Suhartono dalam karangan ketiga. Memang dalam sepuluh tahun terakhir ini volume perdagangan dua arah antara Indonesia dan Amerika Serikat sangat meningkat, sehingga timbullah pertanyaan akan perkembangan perdagangan ini dan pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia dalam dasawarsa yang baru kita injak.

Tentu saja hubungan ekonomi Indonesia-Amerika Serikat hanya merupakan sebagian kecil dari perdagangan internasional, yang ternyata kerap dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di dunia ini. Hubungan antara Multinational Corporation ini dan ASEAN adalah bahan analisa yang berikutnya.

*Akhirnya **Analisa** mengemukakan suatu tema yang tidak luput dari perdebatan internasional dalam dasawarsa yang lalu dan akan tetap menjadi masalah dalam dasawarsa baru ini; yakni masalah minyak bumi dan bahan bakar. Kerawanan suplai minyak Negara-negara Barat menjadi sorotan **Analisa** edisi ini.*

Januari 1980

REDAKSI

BEBERAPA PANDANGAN MENGENAI PERKEMBANGAN NILAI DOLLAR AMERIKA

J. PANGLAYKIM

Pertanyaan tentang nasib Dollar Amerika sering timbul pada para bankir, pedagang, industrialis dan para pengambil keputusan pada waktu memikirkan perekonomian dan pada saat merencanakan tindakan-tindakan. Masalah Dollar Amerika adalah masalah yang kompleks, sehingga menurut laporan bankir terkenal Von Tobel (Swiss), berbagai laporan dan pandangan yang pernah diberikan merupakan sekedar observasi dan tidak dapat disebut lengkap.

LAPORAN BANKIR VON TOBEL

Menurut laporan ini, dalam mempersoalkan melemahnya Dollar Amerika hampir semua orang menumpahkan kesalahan kepada apa yang dinamakan "krisis energi di Amerika". Laporan bank Von Tobel mengatakan bahwa pandangan ini hanya sebagian saja benar. Tetapi tidaklah lengkap bilamana krisis energi di Amerika dianggap sebagai satu-satunya sumber melemahnya Dollar Amerika.

Benar bahwa Amerika terus-menerus dan dalam jumlah yang senantiasa meningkat harus membiayai pengimporan minyak. Di lain pihak, para penerima Dollar memperolehnya dalam jumlah-jumlah yang cukup besar. Dan jumlah-jumlah yang mereka pergunakan untuk ditanam di Amerika atau membeli barang-barang Amerika jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang mereka peroleh. Tetapi jumlah-jumlah yang mereka depositokan di bank-bank internasional cukup besar.

Maka surplus Dollar yang dimiliki oleh para produsen minyak dikonversi ke dalam mata uang lain seperti Mark Jerman, Yen Jepang dan Franc Swiss.

Seandainya surplus Dollar produsen minyak ini tidak mereka konversi ke dalam mata uang lain, melainkan dipergunakan untuk perdagangan dan investasi, diperkirakan bahwa Dollar tidak akan mengalami penurunan dalam nilai. Kalau pun Dollar ini oleh pemiliknya tidak ditanam sebagai modal atau dipakai dalam perdagangan, asalkan tidak dikonversi ke dalam mata uang lain maka Dollar yang dipegang oleh pemiliknya ini dapat dilihat sebagai alat pembayaran yang mempertahankan nilainya (value retaining).

Sikap para pemegang Dollar Amerika itu menentukan sekali nasib Dollarnya sendiri. Para pemegang Dollar tampaknya melihat bahwa setelah nilai tukar yang pasti tiada lagi, fluktuasi dalam alat pembayaran cukup menguatirkan. Maka untuk menyebarkan risiko secara lebih realistis, mereka berusaha mengurangi jumlah yang dipegang dalam bentuk Dollar. Ini berarti bahwa setelah nilai tukar yang pasti tiada lagi tingkat nilai tukar di antara berbagai alat pembayaran ditentukan oleh mekanisme pasar (permintaan dan penawaran). Banyak penawaran dari mereka yang ingin lepas dari pemilikan Dollar Amerika, sementara pembelinya senantiasa menipis.

Setiap kali terjadi suatu pergeseran besar-besaran untuk mengalihkan pemilikan Dollar ke beberapa mata uang lain, maka gejala ini akan merupakan suatu tekanan atas pasar alat pembayaran internasional. Tingkat harga di Amerika pun, misalnya meningkat lebih cepat daripada di Swiss dan Jerman. Ini berpengaruh atas "paritas daya beli" (purchasing power parity). Menurut teori paritas daya beli, faktor penting yang menentukan tingkat nilai tukar antara berbagai mata uang ialah daya belinya masing-masing di dalam negeri.

Para penganalisa berpendapat bahwa para pemimpin ekonomi di Jerman dan Swiss misalnya, tampak mengambil

tindakan-tindakan agar dapat mempertahankan paritas daya beli ini dan menstabilkan mata uangnya. Di Amerika sebaliknya, para pemimpinnya belum tampak dapat mengendalikan inflasi. Para pengamat sebagaimana kita ketahui berpendapat bahwa kepemimpinan pemerintahan Amerika sedang mengalami credibility gap di bidang ekonomi, moneter dan politik. Mungkin inilah salah satu sebab maka Presiden Carter mengganti beberapa menteri inti, seperti Menteri Keuangan dan Menteri Energi. Tetapi para penganalisa Swiss berpendapat bahwa masalahnya tidak dapat diselesaikan di dalam negeri saja, karena masalah-masalah dalam pasar internasional juga harus diperhitungkan.

Laporan Von Tobel menunjuk kepada masalah pasar euro-dollar. Masalah lain yang dapat dilihat sebagai penghambat ialah peranan Dollar Amerika sebagai salah satu mata uang kunci yang penting dalam perdagangan internasional dan sebagai tulang punggung pasar uang dan modal internasional. Pasar internasional ini lebih dikenal sebagai *euro-capital* dan *euro-money market*. Pernah kami tulis bahwa pasar ini tak bertujuan, tak berkebangsaan, dan tidak dapat diawasi atau dipengaruhi oleh sesuatu pemerintah secara individual.

Menurut perkiraan konservatif, jumlah yang terlihat dalam pasar ini bernilai US\$ 583 milyar. Dari jumlah ini 84% dalam Dollar Amerika dan sisanya dipegang dalam Mark Jerman (sekitar 9%) dan sisanya dalam Franc Swiss dan lain-lain. Sumber lain (lihat Tabel I) memperlihatkan angka-angka yang berlainan. Dalam tahun 1978 diperkirakan berjumlah 890 dan persentase dalam Dollar adalah 74%. Melihat pola pasar tersebut, dapat diperkirakan bahwa sesuatu goncangan atau pergeseran beberapa persen saja akan mempunyai pengaruh besar terhadap nilai tukar Dollar Amerika. Jumlah-jumlah yang tersedia dalam bentuk Mark, Franc dan lain-lain, tidak sepadan dengan jumlah-jumlah yang dipegang dalam bentuk Dollar Amerika. Akibatnya ialah bahwa suatu tekanan atas sesuatu

Table 1

EURO-CURRENCY MARKET SIZE

(based on foreign-currency liabilities and claims of banks in major European countries, the Bahamas, Bahrain, Cayman Islands, Panama, Canada, Japan, Hong Kong, and Singapore billions of dollars (rounded to nearest \$5 billion), at end of period)

	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978 ^r	1979 ^r Mar ^p
Estimated size										
Gross	110	145	200	305	375	460	565	695	890	915
Liabilities to nonbanks	30	30	35	55	75	80	100	125	165	n.a.
Liabilities to central banks	15	15	25	40	60	70	85	110	120	n.a.
Liabilities to other banks ^a	65	100	140	210	240	310	380	460	605	n.a.
Net	65	85	110	160	215	250	310	380	475	490
Claims on nonbanks	25	35	45	65	100	115	145	190	235	n.a.
Claims on central banks and on banks outside market area ^b	30	35	45	75	95	115	140	160	195	n.a.
Conversions of Euro funds into domestic currencies by banks in market area ^c	10	15	20	20	20	20	25	30	45	n.a.
Euro-dollars as % of gross liabilities in all Euro-currencies	81	76	78	73	77	78	79	76	74	n.a.

Notes : a includes unallocated liabilities

b includes unallocated claims

c in European market area only

^r revised

^p preliminary

Source : *World Financial Markets* — Morgan Guaranty Trust Company of New York, July, 1979

mata uang akan menimbulkan pengaruh yang cukup meroket terhadap mata uang lain.

Bank-bank sentral tampaknya kurang mampu menghadapi pasar euro-money dengan pemilikan-pemilikan Dollar yang jumlah nilainya US\$ 490 milyar di dalam pasar modal internasional dibandingkan dengan cadangan moneter bank-bank sentral yang tidak melebihi US\$ 81 milyar.

Angka-angka perbandingan ini dapat menunjukkan kepada kita bahwa bank-bank sentral kurang berdaya jika mereka ingin mendukung nilai Dollar. Mereka sekedar dapat melakukan upaya pencegahan bila terjadi fluktuasi yang terlalu membahayakan, tetapi tidak dapat menyelesaikan masalahnya yang pokok.

Melihat gambaran permasalahan seperti itu, maka strategi menyebar risiko dapat dipahami. Yang menjalankan strategi ini tentu saja perusahaan-perusahaan multinasional, produsen-produsen minyak pemegang alat pembayaran dalam jumlah-jumlah besar, pemerintah-pemerintah dan lain-lain.

Kurang adanya kepemimpinan di dalam pasar uang dan modal internasional telah mendorong semua pemegang alat pembayaran internasional untuk memegang modal tunai dalam bentuk mata uang.

Konsep "currency basket" sudah diterima oleh para pemegang mata uang ini, sehingga menurut laporan Von Tobel ini pembagian alat pembayaran yang dipegang ke dalam berbagai mata uang akan secara otomatis mendorong para pemegangnya untuk melakukan penggeseran-penggeseran.

Dalam praktek, yang terjadi ialah bahwa bank-bank sentral negara-negara yang kurang besar juga mulai mengalihkan Dollar yang dipegangnya ke dalam mata uang lain dan diperkirakan mereka beralih ke Mark Jerman dan Yen Jepang.

Semua ini merupakan tekanan atas nilai Dollar Amerika di pasar internasional. Pendekatan ke arah penyelesaian masalah nilai Dollar Amerika di pasar internasional pun tidak dapat dilakukan oleh Amerika sendiri saja. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan bersama-sama dengan bank-bank sentral lain yang mempunyai Dollar dalam jumlah besar.

"External money supply" Amerika (euro-dollar), misalnya mencapai US\$ 490 milyar sementara "domestic money supply"-nya hanya US\$ 343 milyar. Suplai Dollar di luar lebih besar daripada suplai Dollar di dalam negeri Amerika, dan ini menyulitkan para perumus kebijakan moneter di negeri itu. Laporan dan analisa yang dikemukakan dalam laporan bank Von Tobel dapat diringkaskan sebagai berikut:

- (a) Masalah kebijakan energi Amerika merupakan salah satu sebab yang telah melemahkan nilai Dollar Amerika;
- (b) Dollar Amerika yang dahulu dianggap value retaining sudah tidak dominan lagi, walaupun masih tergolong mata uang kunci dalam euro-dollar;
- (c) Dengan tiadanya lagi kurs tukar tetap, tingkat penukaran Dollar Amerika dan lain-lain mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar internasional;
- (d) Para pemegang Dollar tampaknya mulai mempraktekkan konsep "currency basket" sehingga secara otomatis terjadi penggeseran-penggeseran dari pemegang Dollar Amerika kepada mata uang lain seperti Mark, Franc, Yen dan sebagainya;
- (e) Dalam komposisi euro-money (uang tak bertuan) ternyata 84% daripadanya masih terdiri dari Dollar Amerika, sehingga penggeseran sebesar beberapa persen saja akan mempunyai pengaruh terhadap nilai Dollar itu;
- (f) Dengan kata lain Dollar yang ditawarkan di pasar internasional melebihi permintaan, dan ini akan berpengaruh menekan terhadap nilai Dollar;

- (g) Perbedaan tingkat inflasi dan tindakan-tindakan pengendalian inflasi telah berpengaruh terhadap paritas daya beli dan di sini tampak Jerman Barat telah berhasil mempertahankan kestabilan Mark, sementara Amerika kurang berhasil;
- (h) Di antara para pemegang Dollar terdapat suatu kekurangan kepercayaan terhadap Amerika, dan ini mempengaruhi juga sikap para pemegang Dollar;
- (i) Jumlah suplai Dollar sebesar US\$ 490 milyar di luar Amerika dibandingkan dengan US\$ 343 di dalam Amerika merupakan aspek lain yang menyebabkan perlunya dianjurkan agar pendekatan masalah nilai Dollar diselesaikan secara bersama-sama (internasional), dalam hubungan dengan pola sistem moneter internasional kurangnya kepemimpinan moneter dirasakan sekali dalam pasar uang dan modal;
- (j) Ini berarti bahwa nilai Dollar sebagai mata uang yang "value retaining" sudah dianggap tergerogoti, sedang penyusunan laporan melihat bahwa Dollar tetap masih bertahan sebagai mata uang kunci bersama-sama dengan Mark, Yen dan Franc Swiss, dan melihat jumlahnya masih beredar dalam pasar euro-money, Dollar Amerika masih merupakan mata uang yang dominan.

Demikianlah beberapa catatan dari laporan bank Von Tobel. Tentu saja laporan ini harus dibaca bersama dengan analisa-analisa lain dari Amerika sendiri, negara-negara Eropa lain, Asia dan sebagainya. Semua perkembangan yang dibahas itu akan berpengaruh terhadap mata-mata uang di negara-negara ASEAN, Hongkong dan sebagainya. Perkembangan Dollar Amerika mempunyai pengaruh cukup besar terhadap sistem pembayaran internasional di antara negara-negara ASEAN karena sebagian besar pembayaran masih dilakukan dengan menggunakan Dollar Amerika sebagai satuan tukar.

Perkembangan Dollar di pasar internasional dan

konsekuensinya dapat dan akan meresahkan banyak pengusaha di negara-negara ASEAN yang banyak meminjam Dollar dalam bentuk kredit off shore. Demikian pula bankir-bankir dan pemerintah negara-negara ASEAN. Maka tepat kiranya kalau dibentuk suatu tim untuk mengikuti perkembangan tersebut. Tetapi yang penting bukanlah memonitor saja melainkan meneruskan analisa-analisanya kepada masyarakat bisnis, industri perbankan dan sebagainya secara teratur dan berkala, agar kita tidak terkena kejutan-kejutan yang dapat berpengaruh kurang baik terhadap sumber-sumber nasional.

LAPORAN BUSINESS WEEK, 6-8-1979

Laporan bankir Von Tobel tentang nasib Dollar Amerika, tentang tingkah laku para pemegang alat pembayaran internasional, tentang kecenderungan para pemegang Dollar ini untuk menyebar risiko dengan cara memegang berbagai mata uang lain seperti Franc Swiss dan DM, tentang kemustahilan mengatasi masalah nilai Dollar tanpa kerja sama internasional, semuanya itu dapat dilengkapi dengan sebuah karangan dalam *Business Week* (BW) terbitan 6 Agustus 1979.

Menurut laporan *Business Week* tersebut, walaupun Washington sampai saat ini membantah, di kalangan pasar alat-alat pembayaran luar negeri beredar perkiraan bahwa dalam waktu 15 bulan mendatang, akan diadakan semacam pengawasan atas gerak-gerik pasar modal, dalam rangka usaha mendukung nilai Dollar. Tetapi kalangan ini juga berpendapat bahwa, seperti gagalnya usaha pembatasan terhadap gerak-gerik modal yang pernah diadakan dalam tahun-tahun 1960-an, pengawasan atas gerak-gerik modal kali ini juga tidak akan berhasil. Mereka berpendapat bahwa pemerintahan Carter akan terdorong ke arah pembatasan untuk dapat mencegah roboh dan lumpuhnya Dollar serta sistem keuangan internasional. Pengawasan atas modal akan melarang MNC Amerika dan bank-bank internasional meminjam di Amerika untuk diguna-

Table 2

EURO-CURRENCY BANK CREDITS (publicly-announced in period, in millions of dollars)

	1976	1977	1978	1979			Jan-Jul	
				May ^r	Jun ^r	Jul ^p	1979	1978
Industrial countries	11 254	17 205	28 952	2 137	1 647	1 550	11 974	19 095
Canada	885	3 292	5 705	100	—	—	400	5 003
Denmark	607	868	2 242	30	—	600	990	745
Finland	300	314	550	—	—	—	50	408
France	556	2 325	1 915	1 100	100	85	1 645	1 315
Greece	323	204	509	140	—	—	140	405
Ireland	433	440	616	250	—	300	550	616
Italy	355	1 024	2 485	120	220	—	1 680	1 100
Japan	370	112	27	—	—	—	—	26
Norway	472	182	1 517	25	—	165	551	1 055
Spain	2 037	1 973	2 426	100	351	90	2 033	1 393
Sweden	440	1 446	1 872	90	—	—	233	757
United Kingdom	1 671	1 992	3 899	25	15	—	490	2 989
United States	677	826	1 206	—	—	255	953	656
Other ^a	2 097	2 207	3 983	157	961	55	2 259	2 627
Developing countries	15 017	20 976	37 300	2 913	4 696	5 178	26 589	21 539
Non-OPEC countries	11 019	13 494	26 902	2 618	3 486	3 095	18 876	15 377
Argentina	957	849	1 461	125	250	—	1 587	667
Brazil	3 232	2 814	5 634	332	810	100	3 247	3 045
Chile	208	591	1 045	—	96	51	220	515
Korea	738	1 265	2 651	—	642	—	1 580	1 674
Malaysia	207	212	858	100	—	—	100	658
Mexico	1 993	2 727	7 250	668	1 114	870	5 132	4 032
Morocco	641	797	605	—	—	300	500	455
Peru	395	189	—	—	—	388	438	—
Philippines	970	698	2 073	—	89	300	1 113	1 406
Taiwan	219	524	255	222	42	60	684	110
Other ^b	1 458	2 828	5 070	1 171	443	1 026	4 275	2 815
OPEC countries	3 999	7 481	10 398	295	1 210	2 083	7 704	6 162
Algeria	643	723	2 576	—	93	—	1 058	1 521
Indonesia	469	817	1 118	—	189	425	1 032	719
Iran	1 411	1 220	1 107	—	—	—	—	721
United Arab Emirates	55	1 086	726	—	120	14	374	584
Venezuela	1 185	1 666	2 054	100	535	1 275	3 693	1 364
Other	235	1 969	2 817	195	273	369	1 547	1 253
Communist countries	2 503	3 394	3 767	2 000	276	254	5 675	2 127
China	—	—	—	2 000	—	—	3 325	—
East Germany	215	832	642	—	256	—	436	422
Hungary	300	300	700	—	—	—	10	400
Poland	525	19	374	—	20	72	652	304
Other ^c	1 463	2 243	2 051	—	—	182	1 252	1 001
International organizations	74	190	160	—	—	—	125	—
TOTAL	28 850	41 765	70 179	7 050	6 619	6 962	44 354	42 761

Notes : ^aincludes multi-national organizations

^bincludes regional development organizations

^cincludes COMECON institutions

^ppreliminary

^rrevised

Source : World Financial Markets — Morgan Guaranty Trust Company of New York, July, 1979

kan oleh anak-anak perusahaan atau cabang-cabangnya di luar Amerika. Secara teoritis ini akan mencegah mengalirnya Dollar dari Amerika dan mencegah menurunnya nilai Dollar lebih lanjut.

Selanjutnya ini berarti bahwa pembatasan itu akan mendorong perusahaan-perusahaan Amerika untuk meminjam dalam euro-market. Dengan demikian permintaan kredit dalam euro-market akan membesar, dan akibatnya ialah meningkatnya tingkat bunga. Dengan adanya peningkatan kebutuhan akan kredit oleh negara-negara yang sedang berkembang untuk membiayai kenaikan harga minyak, diperkirakan tingkat bunga akan sangat meningkat.

Juga kalangan-kalangan di Eropa memperkirakan bahwa Amerika akan mengambil tindakan-tindakan yang menjurus ke arah pengawasan gerak modal ke luar Amerika.

Pasar euro-money memungkinkan para peminjam memasuki pasar ini dengan lebih mudah. Kalau dahulu peminjam-peminjam seperti Korea Selatan, negara-negara ASEAN dan negara-negara Amerika Latin tidak dapat memasuki pasar high finance — pasar keuangan internasional tingkat tinggi, dewasa ini mereka sudah menjadi peminjam yang mengambil manfaatnya (lihat Tabel II) untuk kredit-kredit dalam "euro-currency".

Tindakan Diversifikasi

Tampaknya para pemain dalam dunia keuntungan internasional dalam tindakan-tindakannya kurang bermotif mempertahankan atau membantu stabilitas sistem moneter internasional. Mereka tampaknya lebih terdorong oleh maksud mempertahankan nilai dari masing-masing cadangannya (portofolio). Ini berlaku baik bagi kalangan petugas bank-bank sentral maupun kalangan MNC dan kalangan-kalangan bisnis lain. Ini juga berlaku pada negara-negara penghasil minyak (OPEC), yang

mengaitkan harga minyaknya dengan nilai Dollar. Harga minyak yang meningkat tidak akan ada artinya bilamana tidak diambil tindakan-tindakan yang dapat mengkompensasi nilai Dollar dalam pasar internasional. Mereka mencari cara-cara agar tidak terlalu banyak memegang Dollar di dalam cadangannya. Mereka memilih diversifikasi.

Pada akhir tahun 1975 deposito euro-money adalah dalam Dollar (78%) (lihat Tabel I). Dewasa ini sudah menurun hingga tinggal 74% dari 78% jumlah yang ada pada akhir 1975 itu. Pola yang sama diperlihatkan pula oleh bank-bank sentral. Menurut Bank for International Settlement, kurang lebih US\$ 16,7 milyar yang disimpan sebagai cadangan di luar Amerika adalah dalam mata-mata uang bukan Dollar.

LAPORAN THE ECONOMIST, 28-7-1979

Laporan Von Tobel dan *Business Week* tentang Dollar ini juga dapat dilengkapi dengan laporan dan penilaian *The Economist* terbitan 28 Juli 1979. Menurut *The Economist*, trend ini memang tidak akan berjalan tanpa perubahan. Akan tetapi melihat tindakan-tindakan yang diambil Amerika selama dua tahun terakhir ini berupa berbagai macam tindakan moneter, undang-undang energi, intervensi paket Nopember, dan sebagainya. Kecenderungan mencari "keranjang mata uang" akan terus berlangsung, ini banyak sekali tergantung juga pada para manajer cadangan dalam melihat dan menilai currency mixt tersebut.

Dalam hal ini *The Economist* berpendapat bahwa kita sebaiknya memperhatikan dua aspek yang akan mempengaruhi sikap para manajer cadangan-cadangan tersebut.

1. Dollar masih merupakan alat pembayaran yang lebih banyak beredar dibandingkan dengan mata-mata uang lain, selain para manajer cadangan-cadangan dapat membeli dan menjual financial assets di Amerika dalam jumlah dan

keserbagunaan yang sulit dicarikan tandingannya di pusat-pusat lain. Maka dapat dipahami adanya jumlah-jumlah investasi yang sedang mengalir ke Amerika, sampai-sampai diadakan semacam pembatasan terhadap arus kedatangan bank-bank luar negeri yang ingin membeli bank-bank di Amerika (lihat kasus Hongkong and Shanghai Bank yang sedang dalam proses akuisisi salah satu bank besar di Amerika). Akan tetapi perekonomian Amerika sendiri sedang menghadapi berbagai macam kesulitan, seperti hilangnya daya saing di pasar internasional, ketidakstabilan harga dan sebagainya.

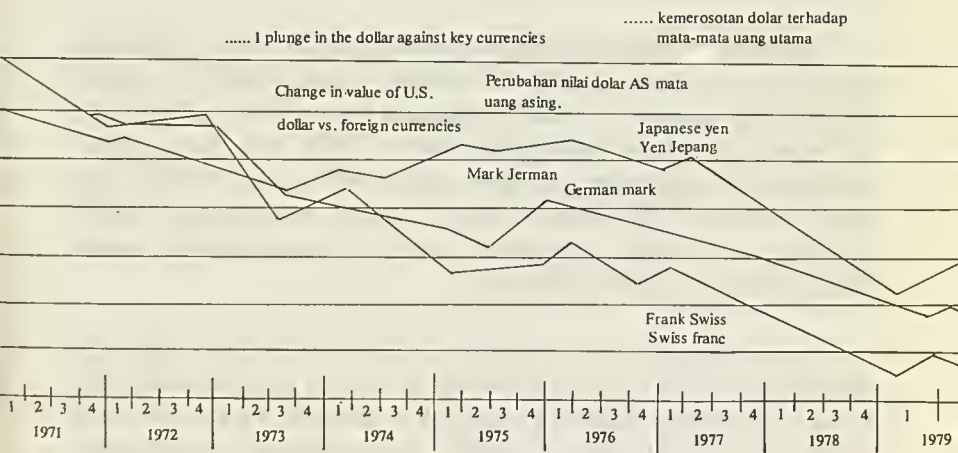
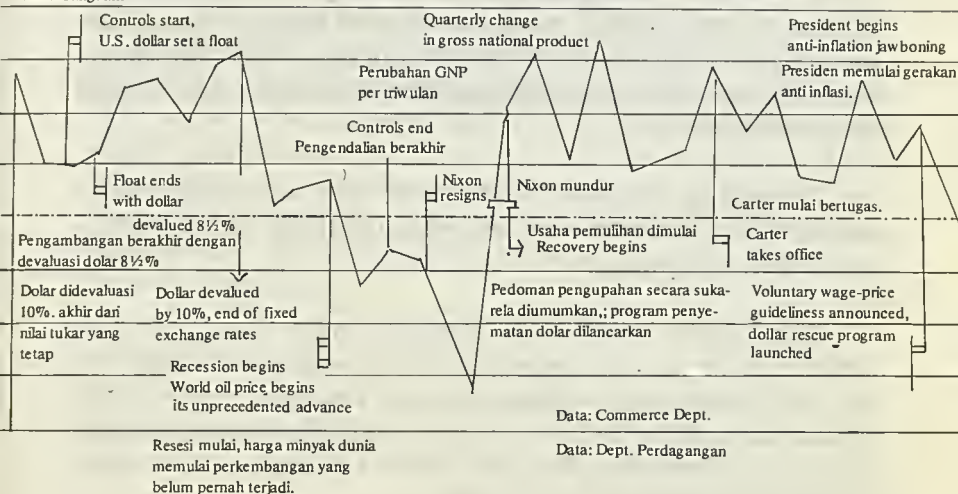
2. Persoalan apakah peranan Dollar sebagai peran cadangan akan dapat dipertahankan. IMF misalnya, sudah sejak 1973 memikirkan suatu substitution account. Tetapi ini tampaknya masih ditentang oleh para pemegang kekuasaan moneter.

Kesimpulan penilaian *The Economist* tampaknya ialah bahwa dunia sedang mencari mata-mata uang lain sebagai cadangan dan kesimpulan itu tampaknya sama dengan kesimpulan Von Tobel bahwa para pemegang cadangan sedang mengarah kepada pembentukan basket of currencies. Juga penilaian *The Economist* ini mengaitkan nilai Dollar dengan naik turunnya kedudukan Presiden Carter.

Dalam bulan Nopember 1978 pemerintahan Carter mengambil berbagai tindakan untuk mencegah merosotnya nilai Dollar dalam pasar internasional. Dari pembahasan terdahulu sudah kita ketahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk menunjang nilai Dollar, dan hasilnya pun memang tidak terlalu memuaskan, karena nilai Dollar tampaknya sudah kembali kepada keadaannya yang lemah seperti sebelum diumumkannya paket Nopember 1978 (lihat grafik).

Presiden Carter kemudian mengangkat G. William Miller

HOW THE CARTER ECONOMY MEASURES UP: SLOWING GROWTH



Sumber : Business Week
August 6, 1979

menjadi Menteri Keuangan, tokoh yang disegani dunia bisnis dan keuangan, yang tadinya mengetuai Federal Reserve Board, dan mengangkat Paul Volckner yang terkenal konservatif dalam kebijakan moneter sebagai penggantinya sebagai Ketua Federal Reserve Board.

Pasar-pasar alat-alat pembayaran luar negeri tampaknya sedang dalam keadaan nervous. Suasana dalam dunia internasional cukup pesimis.

Tampaknya belum pula dipahami secara mendalam oleh dunia industri dan oleh mereka yang memegang kepemimpinan dan kekuasaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional, Bank Dunia dan sebagainya, bahwa kekuatan dan pola dunia keuangan internasional sudah mengalami banyak perubahan.

Perubahan-perubahan ini dapat dilihat dari sudut cadangan resmi yang mereka kuasai. Di dalam tahun 1960, 11 negara industri menguasai 73% dari cadangan resmi dunia. Persentase ini menurun sampai 64% dalam tahun 1970, dan dalam tahun 1978 diperkirakan menurun lagi sampai 54%. Kekuatan mereka lebih menurun lagi pada waktu jumlah euro-money sudah melampaui jumlah cadangan tersebut, sebagaimana sudah dibahas dalam bagian terdahulu.

Laporan-laporan Von Tobel, *Business Week* dan *The Economist* semuanya menggambarkan bahwa kemerosotan lebih lanjut nilai Dollar Amerika akan sukar dicegah, karena Amerika sendiri saja tidak akan mampu menyelesaikan masalahnya; penyelesaian masalahnya harus merupakan kerja sama antara bank-bank sentral yang banyak memegang Dollar.

Suasana pesimis yang dilaporkan *The Economist* menggambarkan adanya tekanan untuk menjual Dollar Amerika. Dan para pemegang cadangan, dalam rangka mencari diversifikasi,

sedang menuju ke arah basket of currencies.

Jika semua yang diramalkan itu menjadi kenyataan, tampaknya pengawasan arus Dollar ke luar dari Amerika juga akan terjadi seperti diperkirakan oleh kalangan-kalangan pasar alat-alat pembayaran luar negeri di Amerika dan Eropa. Kebutuhan MNC Amerika akan modal akan harus dipenuhi oleh pasar-pasar euro-money, sehingga permintaan akan kredit akan meningkat, dengan akibat lebih lanjut berupa turut meningkatnya tingkat bunga.

BENARKAH SISTEM NILAI TUKAR MENGAMBANG SEDANG DIUJI?

N. ARSJAD

Judul tulisan ini disajikan dalam bentuk pertanyaan. Untuk sebagian orang mungkin pertanyaan tersebut mengherankan, karena meragukan keunggulan sistem nilai tukar mengambang (floating exchange rates system) di dalam menjalankan misinya sekarang ini. Padahal dalam perkembangan ekonomi dasawarsa 1970-an sistem nilai tukar mengambang, sejak tahun 1973, telah diperkenalkan di kebanyakan negara-negara maju di dunia. Bahkan di tahun 1976 IMF secara resmi membenarkan negara-negara memilih sistem "floating rates". Di samping itu para ahli ekonomi kenamaan seperti misalnya Robert Triffin, Gottfried Harberler, Richard N. Cooper dan Milton Friedman mengakui keunggulan sistem ini. Apakah dengan pertanyaan tersebut negara-negara di dunia harus kembali kepada sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rates system)?

Memang, masalahnya tidak semudah itu. Yang penting sebenarnya bukan mempermasalahkan pilihan antara sistem nilai tukar tetap dan yang mengambang. Masalahnya adalah apakah bisa dipertahankan kestabilan nilai tukar mata uang keseluruhan negara-negara di dunia. Kestabilan nilai tukar mata-mata uang sangat menunjang pertumbuhan perdagangan internasional secara sehat dan yang menguntungkan semua pihak.

Pertanyaan yang disajikan sebagai judul karangan ini timbul karena sistem nilai tukar mengambang dilatarbelakangi oleh adanya ketidakstabilan nilai tukar mata uang Dollar Amerika Serikat sekarang ini. Karenanya lantas timbul pikiran,

apakah kegoncangan nilai tukar Dollar Amerika Serikat bukan merupakan produk sistem nilai tukar yang mengambang? Inilah yang menjadi pokok pembahasan tulisan ini.

SISTEM NILAI TUKAR MENGAMBANG: ARTI DAN PERANANNYA

Oleh karena masing-masing negara mempunyai sistem moneter dan nilai uang yang berbeda-beda, maka penetapan nilai tukar antar mata uang negara-negara menjadi amat penting untuk mengarahkan arus perpindahan barang-barang dagangan (komoditi), jasa-jasa dan kapital di antara bangsa-bangsa. Untuk mengeksport dan mengimpor barang-barang dan jasa-jasa suatu negara memerlukan sejumlah mata uang asing (foreign exchange) yang harus ditukar dengan mata uang negara itu sendiri. Mata uang asing ini dapat dijual (karena mengeksport) dan dibeli (karena mengimpor) di bursa valuta asing pada suatu harga yang disebut "tingkat nilai tukar" (rate of exchange). Jadi tingkat nilai tukar adalah harga mata uang asing yang diukur menurut nilai mata uang sendiri (the domestic price of foreign money).

Nilai tukar antar mata uang negara-negara bisa terjadi dalam keseimbangan (equilibrium) atau dalam ketidakseimbangan (disequilibrium). Suatu negara bisa saja mengalami defisit atau surplus dalam neraca pembayarannya. Kejadian seperti ini akan mengakibatkan timbulnya ketidakseimbangan nilai tukar mata uang negara tersebut. Apabila suatu negara mengalami defisit terus-menerus di dalam neraca pembayarannya, maka nilai tukar mata uang negara tersebut akan terus merosot terhadap nilai tukar mata uang asing. Keadaan sebaliknya akan terjadi apabila negara tersebut mengalami surplus di dalam neraca pembayarannya.

Salah satu tipe kebijakan negara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran (defisit-surplus) suatu negara (atau

untuk mengoreksi ketidakseimbangan nilai tukar) adalah sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rates system*).¹ Pilihan sistem nilai tukar mengambang dewasa ini populer atau dominan di kalangan negara-negara maju, karena sistem nilai tukar tetap, sekarang ini kurang bisa diterima secara politis, sedangkan sistem nilai tukar yang diawasi pemerintah pada umumnya tidak diinginkan secara ekonomis.² Di dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar suatu mata uang dibiarkan secara bebas bergerak mencari titik keseimbangannya sendiri menurut kekuatan-kekuatan (*forces*) yang ada di pasar (bursa valuta asing).

Di dalam perkembangannya terdapat beberapa variasi sistem nilai tukar mengambang yaitu: (i) "the adjustable peg" (mengubah nilai tukar mata uang dalam satu periode tertentu yang ada hubungannya dengan masalah "devaluasi" dan "revaluasi"), (ii) "the crawling peg" (melakukan devaluasi kecil-kecilan secara teratur dan sering), (iii) "the dirty float" (sistem mengambang dengan sedikit campur tangan bank sentral) dan (iv) "clean float" (sama sekali tanpa turut campur pemerintah).

Dalam tulisan ini tidak akan dibahas bentuk "the adjustable peg" dan "the crawling peg". Pembahasan akan dipusatkan pada bentuk "dirty float" dan "clean float", walaupun pembahasannya tidak diharapkan lengkap.

Sistem nilai tukar mengambang yang mungkin sekarang banyak dianut di beberapa negara maju adalah dalam bentuk "dirty float system" sebagai lawan dari sistem "clean float". Dengan sistem "dirty float" diartikan sebagai sistem di mana

1 Bentuk atau tipe kebijakan lainnya adalah sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rates system*) dan sistem nilai tukar yang diawasi pemerintah (*exchange control system*). Kedua tipe tersebut tidak akan diuraikan dalam tulisan ini.

2 Dudley G. Lockett, *Money and Banking*, McGraw-Hill Book Co., New York, 1976, halaman 518

nilai tukar dibiarkan mengambang bergerak mengikuti kekuatan-kekuatan yang ada di pasar, akan tetapi dengan sedikit turut campur pemerintah (bank sentral) dengan maksud agar supaya perkembangan nilai tukar mata uang yang bergerak bebas itu tidak terlalu bergelombang secara ekstrem. Di dalam kenyataannya nilai tukar mata uang di dalam jangka pendek sering bergerak secara ekstrem di dalam mencari keseimbangannya menurut perkembangan harga di pasar. Jadi turut campur pemerintah di sini bukan untuk merusak keseimbangan menurut apa yang terjadi di pasar tetapi justru ingin melindungi jalannya nilai tukar mata uang (menuju keseimbangan) terhadap gangguan-gangguan yang ekstrem.

Menaksir arah perkembangan nilai tukar mata uang menuju keseimbangan yang tepat diperlukan keahlian dan pengetahuan yang sempurna. Harus dapat dibedakan mana yang merupakan faktor-faktor fundamental dan yang mana yang merupakan faktor-faktor "sementara" yang mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang. Justru karena tidak mungkin pejabat pemerintah mempunyai pengetahuan sempurna tentang hal tersebut, mereka sering berbuat kesalahan yang merugikan proses keseimbangan nilai tukar mata uang itu sendiri. Inilah yang sering kita lihat di dalam kenyataannya bahwa kerja sama antar bank sentral negara-negara sering gagal menahan kemerosotan lebih jauh nilai tukar pada bursa valuta asing.

Sistem "clean float" justru tanpa turut campur tangan pemerintah sama sekali, sekalipun proses nilai tukar mata uang menuju keseimbangan jalannya bergelombang di bursa valuta asing. Ada dua keuntungan yang dikemukakan para penganut jenis sistem ini. Pertama, sistem "clean float" dapat mengurangi keperluan akan cadangan moneter internasional. Selama tidak ada perbedaan antara ketidakseimbangan sementara dan ketidakseimbangan fundamental, maka tidak diperlukan cadangan. Hal ini berarti tidak diperlukan lagi seluruh jaringan kerja internasional untuk mengatur SDRs, jumlah uang yang

harus ditahan, "swap agreements" dan lain sebagainya.¹ Dengan perkataan lain di dalam "clean float system" tidak diperlukan lagi mata uang dunia dan pengaturan jumlah uang dunia (world money supply).² Hal ini berbeda dengan mempertahankan sistem nilai tukar tetap (Bretton Woods System) di mana diperlukan birokrat-birokrat dan sistem administrasi yang rumit (sophisticated). Keunggulan yang kedua, menurut para penganutnya, ialah bahwa usaha-usaha memecahkan masalah stabilisasi dalam negeri dan mempertahankan keseimbangan internasional (international equilibrium) bisa dilakukan secara terpisah, tidak seperti di dalam sistem nilai tukar tetap di mana untuk memulihkan keseimbangan neraca pembayaran internasional diperlukan kebijakan-kebijakan dalam negeri. Dengan perkataan lain kebijakan-kebijakan dalam negeri seperti meningkatkan kesempatan kerja, stabilisasi harga, pertumbuhan dan pembangunan, di dalam suatu negara yang menggunakan sistem nilai tukar mengambang, tidak mempunyai implikasi-implikasi terhadap neraca pembayaran negara tersebut, yang berarti neraca pembayaran akan menuju ke suatu proses keseimbangan secara otomatis.

Dari uraian di muka dapat diketahui bahwa sistem nilai tukar yang mengambang tampaknya sederhana dan jelas. Apabila sistem itu dapat berjalan seperti adanya, maka diperkirakan tidak ada negara mana pun yang menderita defisit atau surplus neraca pembayaran yang parah (a persistent deficit or surplus), meskipun di sesewaktu tertentu mengalami ketidakseimbangan neraca pembayaran sementara (transient disequilibrium). Kritik yang pokok terhadap sistem ini ialah dikhawatirkan bahwa pergeseran-pergeseran nilai tukar mata uang yang terlalu sering akan mengacaukan perdagangan dunia dan pada gilirannya akan mengakibatkan kerugian di dalam

1 Dudley G. Lockett, *ibid.*, halaman 521

2 Charles P. Kindleberger, *Power and Money: The Politics of International Economics and The Economics of International Politics*, Macmillan and Co. Ltd., London, 1970, halaman 224

usaha memakmurkan dunia. Di samping itu sistem nilai tukar mengambang mengundang kaum spekulasi menjalankan peranan mereka yang justru sering mengacaukan suasana. Sistem ini, yang tidak memerlukan lagi mata uang dunia dan jumlah uang yang beredar, akan menjurus kepada sistem "barter". Hal ini akan menghambat perluasan transaksi perdagangan internasional dan tidak efisiennya penggunaan sumber-sumber daya dunia.¹

SISTEM "FLOATING RATES": MENGAPA DIPILIH ?

Perkembangan moneter internasional dasawarsa 1970-an diwarnai oleh serangkaian krisis-krisis. Pertama, terjadi pada tahun 1971, kedua pada tahun 1973, dan melemahnya kembali nilai tukar Dollar Amerika Serikat sejak tahun 1976 hingga sekarang mungkin dapat dipandang sebagai salah satu bentuk krisis moneter internasional dewasa ini. Bibit-bibit yang menimbulkan krisis moneter internasional dasawarsa 1970-an telah nampak jauh sebelumnya, yaitu sejak pertengahan dasawarsa 1950-an di mana Amerika Serikat mengalami defisit di dalam neraca pembayarannya yang menyambung terus-menerus hingga sekarang ini, kecuali untuk tahun 1968 ketika terjadi surplus neraca pembayaran Amerika Serikat. Penyebab defisit terutama ialah adanya perpindahan kapital dari Amerika Serikat ke luar negeri, misalnya dalam bentuk pembiayaan perang-perang terbatas, investasi di luar negeri, banyaknya turis Amerika Serikat dan lain sebagainya. Bersamaan dengan perpindahan kapital tersebut, mengalir pula emas ke luar negeri Amerika Serikat dalam jumlah yang cukup besar. Akibatnya terjadi kegoncangan harga emas di pasaran. Untuk menstabilkan keadaan, maka di bulan April 1968 Amerika Serikat bersama enam negara lainnya (Belgia, Jerman Barat, Italia, Belanda, Swiss dan Inggris) memperkenalkan dua sistem harga emas

1 Charles P. Kindleberger, *loc. cit.*

(harga resmi dan harga di pasaran bebas) yang dikenal dengan nama "the two-tier gold-price system".

Meskipun defisit neraca pembayaran Amerika Serikat telah terjadi terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, sejak 1893 neraca perdagangannya belum pernah mengalami defisit. Walaupun demikian surplus perdagangan Amerika Serikat semakin menurun dari waktu ke waktu, hingga tahun 1971 Amerika Serikat benar-benar mulai mengalami defisit di dalam neraca perdagangannya. Sementara itu perpindahan kapital dan emas ke luar negeri Amerika Serikat terus berlangsung, terutama ke Jerman Barat. Dunia spekulasi yang banyak memiliki "uang panas" (hot money) turut memperuncing keadaan. Banyak mata uang Jerman diborong untuk dikuasai para spekulan, mendahului pemerintah Jerman Barat mengadakan revaluasi mata uangnya. Akibatnya, krisis moneter dunia tidak biasa dielakkan.

Bank Sentral Jerman Barat (Bundesbank) tampaknya tidak mampu menopang mata uang Dollar Amerika Serikat dalam rangka menghadapi kekuatan-kekuatan spekulatif di bursa valuta asing. Sebagai jalan ke luar terpaksa Jerman Barat, juga Belanda, mengembangkan (float) mata uang mereka, sedangkan mata uang Franc Swiss dan Shilling Austria direvaluasikan. Contoh-contoh itu hanyalah sekedar memberikan gambaran betapa kacaunya sistem moneter internasional pada waktu itu. Menjelang pertengahan bulan Agustus 1971 kekuatan-kekuatan spekulatif semakin menekan kedudukan Dollar Amerika Serikat. Akibatnya Pemerintah Amerika Serikat melakukan politik pengawasan devisa dan menyatakan bahwa Dollar Amerika Serikat tidak lagi bisa ditukar dengan berat emas yang dikandungnya (new economic policy 15 Agustus 1971). Walaupun demikian situasi yang mempengaruhi Dollar Amerika Serikat tetap memburuk sehingga Amerika Serikat akhirnya mendevaluasikan mata uangnya di bulan Desember 1971. Keputusan ini diumumkan dalam rangka persetujuan Smithson (Smithsonian agreement) di mana sepuluh negara industri

terkaya di dunia (pada waktu itu) yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman Barat, Inggris, Perancis, Italia, Belgia, Belanda, Swedia dan Kanada telah mengadakan pertemuan untuk mencari pemecahan terhadap krisis moneter dunia yang terjadi.

Pertemuan Smithson tidak membawa hasil. Ini merupakan salah satu contoh kegagalan untuk menstabilkan harga hanya dengan "dekrit" pemerintah dari negara-negara yang mengadakan pertemuan tersebut. Karena situasi, keputusan Smithson tidak bisa dijalankan di dalam kenyataannya. Kekacauan moneter dunia menjadi semakin parah, sehingga sekali lagi Dollar Amerika Serikat didevaluasikan di bulan Pebruari 1973. Pada waktu yang bersamaan Jepang dan Italia menyatakan untuk mengembangkan (float) nilai tukar mata uang mereka. Krisis energi (embargo dan kenaikan harga minyak) di akhir tahun 1973 lebih memperparah lagi kekacauan moneter internasional yang sebelumnya memang sudah terasa itu. Sementara itu Perancis di bulan Pebruari 1974 telah keluar dari sistem nilai tukar bersama (snake system) antara anggota negara-negara MEE dan mengembangkan nilai tukar mata uangnya dengan bebas.

Mengenai perkembangan "snake system" tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam bulan Mei 1972, negara-negara MEE telah memutuskan untuk membikin "luwes" (fleksibel) nilai-nilai tukar mata-mata uang mereka yang mengikuti sistem nilai tukar tetap (fixed rate). Keluwesan nilai tukar tersebut disetujui bersama yaitu di sekitar 2,25% di atas dan di bawah titik sentral nilai tukar tetap tersebut. Kemudian nilai-nilai tukar mata-mata uang mereka (negara-negara MEE) terhadap US Dollar juga "diperluwes" sebesar 2,25% di bawah dan di atas titik sentral nilai tukar mata-mata uang mereka terhadap US Dollar. Inilah yang dinamakan sistem "ular" mata-mata uang mereka dalam batas "terowongan" yang ada ("snake in a tunnel"). Sistem ini baru efektif dijalankan pada bulan April 1972. Kelompok utama negara "ular" ini terdiri atas Jerman Barat, Belgia, Belanda, dan

Denmark (dengan Norwegia turut bergabung).¹ Kemudian segera setelah sistem "snake" berjalan Inggris ikut pula bergabung. Akan tetapi karena situasi pada waktu itu sedemikian rupa (inflasi dunia yang semakin meningkat, nilai tukar US Dollar dinyatakan mengambang dan adanya krisis minyak) sistem ini gagal untuk mengatasi kekacauan nilai-nilai tukar mata-mata uang yang bersumber pada ketidakstabilan nilai US Dollar. Tidak lama setelah bulan April 1972 Inggris ke luar kembali dari sistem tersebut (diikuti juga oleh negara-negara lain) dan mengambangkan nilai tukar mata uangnya. Untuk mengatasi ketidakstabilan moneter internasional yang semakin parah itu, maka pada tanggal 11 Maret 1973 beberapa negara Eropa seperti Jerman Barat, Perancis, Belanda, Belgia, Denmark dan kemudian Norwegia serta Swedia mengadakan sistem nilai tukar mengambang secara bersama terhadap US Dollar ("joint float system"), akan tetapi tetap mempertahankan sistem nilai tukar tetap antar mata uang mereka dalam batas keluwesan sebesar 2,25% di atas dan di bawah titik sentral sistem nilai tetap mereka. Inilah yang dinamakan "a snake without a tunnel".² Bersamaan dengan saat itu Jerman Barat mengadakan revaluasi mata uangnya sebesar 3%. Italia, Inggris dan Irlandia tidak mengikuti sistem "ular" yang baru tersebut dan mengambangkan nilai tukar mereka secara bebas.

Dari uraian singkat tersebut di muka, dapatlah diketahui bahwa sistem "floating rates" yang banyak dianut negara-negara maju itu adalah sebagai akibat adanya kekacauan sistem moneter internasional di awal tahun-tahun 1970-an. Sedangkan kekacauan itu sendiri timbul sebagai akibat adanya perkembangan perdagangan internasional yang pincang (defisit surplus neraca-neraca pembayaran) serta diperhebat lagi dengan adanya

1 *The Economist*, 15 Juli 1978, halaman 51

2 Lihat lebih jauh Robert Solomon, *The International Monetary System, 1945-1976 (an inside's view)*, Harper & Row Publishers, New York 1977, halaman 218-219 dan 233

kekuatan-kekuatan spekulatif yang mempengaruhi bursa valuta asing. Bretton Woods System di dalam mengatur pertukaran uang dan pembayaran internasional ternyata tidak sanggup mengatasi krisis moneter yang berjangkit pada waktu itu. Seperti diketahui, sistem nilai tukar mata uang menurut aturan Bretton Woods didasarkan pada sistem nilai tukar tetap (fixed rates).

Sayangnya sistem "floating rates" sebagai pengganti sistem Bretton Woods tidak ditimbulkan dari suatu proses yang rasional dan tidak didasarkan atas keputusan yang bersifat kerja sama antar negara bangsa. Sistem ini dibutuhkan karena adanya suatu keadaan, yaitu guna menghadapi krisis moneter internasional yang cukup gawat. Dengan diperkenalkannya sistem "floating rates", maka masing-masing negara lebih bebas di dalam menjalankan kebijakan-kebijakan mereka. Selanjutnya masih bisa dipersoalkan, mana yang lebih baik, menjalankan sistem "floating rates" tanpa sama sekali turut campur pemerintah (clean float) atau diperlukan intervensi pemerintah (dirty float).¹ Selain daripada itu, semua ahli sepakat bahwa untuk me-"manage" nilai tukar mata uang diperlukan pengawasan internasional oleh IMF.

BENARKAH FLOATING RATES SEDANG DIUJI?

Sebenarnya masih terlalu pagi untuk memberi jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut di atas. Keunggulan sistem "floating rates" masih harus dibuktikan di dalam kejadian-kejadian nyata di masa-masa mendatang. Akan tetapi pada waktu masih memimpin Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) Arthur Burns pernah membikin pernyataan bahwa ia

¹ Seperti yang telah diuraikan terdahulu bahwa sistem nilai tukar mengambang dengan turut campur tangan pemerintah banyak dianut negara-negara maju dewasa ini

skeptis atas keberhasilan sistem "floating rates"; jangka pendek mungkin berhasil tetapi tidak di dalam jangka panjang.¹

Kemudian, dengan merosotnya kembali Dollar Amerika Serikat terhadap beberapa mata uang negara-negara maju lainnya belakangan ini, orang jadi teringat kembali akan ucapan Arthur Burns tersebut. Lihat misalnya ulasan yang dibuat majalah *Asian Finance* (15 April 1978); di situ jelas-jelas dipertanyakan apakah "the floating regime" di dunia sekarang ini telah berhasil menjalankan tugasnya, yaitu mengatur keseimbangan neraca-neraca pembayaran serta menata kembali (reorder) pola perdagangan dan pembayaran internasional. Jawabannya, menurut *Asian Finance* tersebut, dapat dijumpai pada laporan OECD baru-baru ini, yaitu "tidak".

Suatu pendapat mengatakan bahwa sistem "floating rates" kurang mampu mengatasi situasi kacau yang berubah cepat dan besar-besaran, tetapi mungkin berhasil untuk mengatasi perubahan perlahan-lahan. Oleh para pembaru sistem moneter internasional, sistem mengambang dianggap sangat berguna untuk menghindari gangguan-gangguan tertentu karena adanya tekanan inflasi atau deflasi terutama yang datang dari luar. Dengan perkataan lain, di dalam sistem tersebut tidak dimungkinkan terjadinya "impor inflasi" atau "impor deflasi".

Sistem "floating rates" juga mempunyai kelemahan-kelemahan, antara lain bisa menimbulkan ketidakpastian tentang harga-harga barang impor dan ekspor di masa-masa mendatang (ini tidak berarti bahwa di dalam sistem nilai tukar tetap ada kepastian harga). Terutama sistem "floating rates" yang tidak terbatas (clean float) akan tidak menguntungkan, terutama bagi negara-negara berkembang; sistem yang terlalu luas itu akan merugikan mekanisme penerimaan dan pembayaran devisa. Sistem ini akan menghambat kemajuan pemba-

1 Arthur F. Burns, "Statement to Congress", *Federal Reserve Bulletin*, Juli 1973, halaman 510

ruan moneter serta menghambat pula prospek jangka panjang bagi terselenggaranya kerja sama internasional. Seperti telah dikemukakan juga bahwa di dalam sistem "floating rates" dimungkinkan adanya para spekulasi memainkan peranan mereka baik dalam bentuk (i) melakukan spekulasi langsung dengan menduga naik turunnya suatu mata uang, (ii) mengalihkan (switch) dana dari satu bentuk mata uang cadangan (reserve currency) ke lain bentuk mata uang cadangan dan (iii) perubahan-perubahan di dalam waktu pembayaran pada proses perdagangan internasional.

Sehubungan dengan kemelut nilai tukar Dollar Amerika Serikat kita tidak semata-mata menyalahkan sistem nilai tukar yang mengambang. Kesalahan yang terbesar dari adanya kemelut tersebut terletak pada kebijakan-kebijakan nasional masing-masing negara maju yang banyak mempengaruhi perdagangan internasional dan yang agak menjauhi semangat kerja sama. Kebijakan masing-masing negara tersebut kurang tangkas dan membiarkan perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat. Kebanyakan negara maju kurang mempunyai pandangan untuk mempersiapkan penyesuaian jangka panjang sebagai akibat terjadinya perubahan-perubahan luar biasa di dalam jangka pendek. Naik turunnya nilai tukar beberapa mata uang negara-negara maju tampaknya belum mempunyai pengaruh yang berarti pada perekonomian dalam negeri mereka.

Diberitakan bahwa kemerosotan (depresiasi) nilai tukar Dollar Amerika Serikat sedikit dapat dibendung terutama terhadap D-Mark Jerman Barat pada pertengahan pertama tahun 1977, walaupun belum banyak perubahan terhadap Yen Jepang. Tampaknya negara-negara maju bertekad untuk menghadapi kekuatan-kekuatan spekulatif di bursa valuta asing dengan mengusahakan "aksi bersama", misalnya lewat "swap agreements" di antara bank-bank sentral. Bahkan beberapa waktu yang lalu diberitakan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah menjual emas besar-besaran untuk membendung merosot-

nya Dollar lebih jauh lagi. Suatu pendapat mengatakan bahwa apabila bursa valuta asing sama sekali tidak setuju atas terjadinya tingkat nilai tukar mata-mata uang pada suatu titik seperti yang dikehendaki bank-bank sentral negara-negara, maka bursa valuta asing akan menang.¹ Bagaimana kesudahannya dari pertarungan ini, baiklah kita lihat perkembangannya. Akan tetapi di dalam perkembangannya dapat dilihat bahwa posisi US Dollar semakin melemah. Selama pertengahan kedua di tahun 1977 dan kuartal pertama di tahun 1978 US Dollar kembali mendapat tekanan yang cukup berat sehingga nilainya terus-menerus merosot terhadap beberapa mata uang negara-negara maju, khususnya terhadap Yen Jepang, D-Mark Jerman Barat dan Franc Swiss. Tekanan-tekanan berat tersebut terus berlangsung hingga sekarang ini. Menurut analisa "Morgan Guaranty Trust Company of New York"² selama 12 bulan terakhir ini (dihitung dari September 1977 sampai dengan September 1978) turunnya nilai tukar US Dollar terhadap Franc Swiss dan Yen Jepang menunjukkan keadaan yang paling buruk selama ini yaitu sebesar 56% dan 42% terhadap masing-masing mata uang tersebut. Selama periode itu nilai US Dollar turun sebesar 19% terhadap D-Mark Jerman Barat. Sebagai reaksi dari merosotnya nilai tukar US Dollar yang amat tajam itu, harga emas terus membubung mencapai kenaikan sebesar US\$ 8,25 per ounce menjadi US\$ 242,75 per ounce.³ Kenaikan harga emas itu merupakan cermin ketidakpastian tentang nilai tukar US Dollar dan mata-mata uang lainnya.

USAHA-USAHA MENGATASI KRISIS

Sejak akhir tahun 1976 hingga saat tulisan ini disusun nilai tukar US Dollar belum lagi menunjukkan tanda-tanda stabil. Menjelang akhir dasawarsa 1970-an, Amerika Serikat sebagai

1 *The Guardian*, 18 Desember 1977

2 "The Dollar and The US Balance of Payments", *World Financial Markets*, September 1978, halaman 1

3 *The Asian Wall Street Journal*, 1 Nopember 1978

negara yang memelopori sistem nilai tukar mengambang, sebagai negara yang ingin mempertahankan sistem perdagangan bebas, sebagai negara yang memelopori penyehatan ekonomi dunia dengan politik ekspansinya itu, sekarang banyak mengalami ujian. Pada akhirnya terdapat suatu gejala bahwa kemerosotan nilai tukar US Dollar telah membawa kekacauan hubungan moneter internasional yang tampaknya mulai mencemaskan negara-negara tertentu, termasuk mencemaskan Amerika Serikat itu sendiri. Kekacauan moneter internasional akan membahayakan perekonomian dalam negeri mereka.

Sangat menarik untuk diikuti ialah bahwa pada waktu-waktu nilai US Dollar mendapat tekanan-tekanan berat pada bursa valuta asing, bank-bank sentral beberapa negara maju berusaha menetralsisikannya yaitu dengan jalan membeli US Dollar dengan mata uang sendiri seperti D-Mark dan Yen. Pembelian Dollar secara massal telah mencapai US\$ 30 milyar. Jumlah yang relatif besar itu belum mempunyai arti jika dibandingkan dengan jumlah Dollar yang beredar di luar Amerika Serikat diperkirakan telah mencapai US\$ 500 milyar.¹ Dengan demikian usaha tersebut akan sia-sia jika tidak ada langkah-langkah yang mendukung dari Amerika Serikat itu sendiri.

Para pejabat negara-negara maju selalu mendesak Pemerintah Amerika Serikat untuk mengadakan campur tangan yang lebih aktif lagi dan mendesak Pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan pinjaman dari luar negeri serta mencairkan SDRs bagian Amerika Serikat pada IMF untuk mendukung kestabilan nilai US Dollar.

Dilihat dari sudut kepentingan Jepang dan Jerman Barat melemahnya nilai US Dollar akan mempunyai akibat yang luas atas perekonomian kedua negara tersebut karena perekonomian mereka sangat tergantung pada ekspor. Untuk mencegah

1 *Newsweek*, 7 Agustus 1978

perkembangan ekonomi dari kemunduran, mereka harus berbuat lebih banyak lagi dari yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat.

Sementara itu kerja sama antar bank sentral negara-negara maju yang berkepentingan akan stabilnya nilai US Dollar selama ini, melalui mekanisme yang dikenal dengan "swap arrangements", masih dipandang usaha "tambal sulam" yang hanya merupakan usaha pencegahan atas kekuatan-kekuatan spekulatif yang bisa merusak kestabilan US Dollar. Goncangnya nilai US Dollar selama ini di samping dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan spekulatif pada bursa valuta asing, juga yang lebih mendasar lagi ialah disebabkan oleh sifat yang sangat kompleks dari masalah neraca pembayaran Amerika Serikat sekarang ini. Pada umumnya orang menerima suatu analisa bahwa penyebab utama lemahnya nilai US Dollar adalah karena defisit perdagangan Amerika Serikat (termasuk impor minyak bumi yang besar) pada dua tahun terakhir ini serta terdapat pula perpindahan kapital (dalam batas tertentu) ke luar negeri Amerika Serikat. Adanya perbedaan inflasi antar negara maju, kemampuan bersaing Amerika Serikat yang cukup lemah dalam dunia perdagangan internasional, serta adanya perubahan struktural yang terjadi di negara-negara berkembang yang lebih maju (misalnya di Asia Tenggara dan Asia Timur) juga merupakan faktor-faktor yang turut mempengaruhi lemahnya posisi US Dollar.

Untuk mengatasi situasi moneter internasional jangan sampai lebih buruk lagi, maka baru-baru ini di bulan Oktober 1978 beberapa negara di Eropa Barat yang sistem mereka tunduk pada "snake system" telah mengadakan beberapa tindakan bersama dengan tujuan untuk menciptakan kestabilan nilai tukar antar mata uang mereka khususnya dalam menghadapi kegoncangan nilai tukar US Dollar. Jerman Barat telah mengadakan revaluasi sebesar 4% terhadap negara-negara "ular" tersebut. Belanda dan Belgia telah mendevalusi mata

uang mereka masing-masing sebesar 2% terhadap mata uang negara-negara dalam "snake system" tersebut. Dengan tindakan-tindakan bersama itu diharapkan negara-negara tersebut bisa mempengaruhi perimbangan moneter internasional ke arah stabilisasi dan pertumbuhan moneter yang sehat.

Sebelumnya, negara-negara yang bergabung ke dalam "Masyarakat Ekonomi Eropa" (MEE) juga telah melangsungkan pertemuan di Bremen (6-7 Juli 1978) yang membahas gagasan baru yang diprakarsai "Franco-German" untuk membangun wilayah (zone) stabilitas moneter di Eropa. Untuk menjaga kestabilan moneter di dalam wilayah mereka akan disediakan dana stabilisasi sebesar US\$ 50 milyar yang akan digunakan untuk membeli dan menjual mata-mata uang asing. Gagasan tersebut juga pada hakikatnya merupakan pembaruan "snake system" yang sudah ada. Negara-negara "ular" tersebut diperkenankan melakukan keluwesan (fleksibel) nilai tukar tetapnya 1% di atas dan di bawah titik sentral dan bagi negara yang menderita inflasi yang keras diperkenankan mencari keluwesan sampai 4,5%.¹ Gagasan tersebut masih memerlukan waktu di dalam pelaksanaannya. Walaupun banyak yang menyangsikan keberhasilan sistem tersebut,² namun hal tersebut merupakan langkah yang baik menuju pemulihan kesehatan hubungan moneter internasional.

Amerika Serikat itu sendiri belakangan ini lewat Bank Sentralnya (Federal Reserve Bank) lebih aktif lagi mengadakan penyesuaian tingkat bunga ("discount rate") pinjaman dalam negeri di dalam rangka menunjang kedudukan US Dollar. Beberapa waktu yang lalu bunga pinjaman di Amerika Serikat telah diubah menjadi 8,5% suatu tarif yang lebih tinggi dari yang berlaku di negara-negara Eropa.

1 "World Outlook: Taking the Bull by the Horns", *ASEAN Business Quarterly*, Second Quarter, 1978, halaman 5

2 Antara lain lihat lebih jauh *The Economist*, 15 Juli 1978 dan *The Guardian*, 16 Juli 1978

Langkah-langkah yang lebih fundamental lagi telah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kongres Amerika Serikat telah menyetujui Rencana Undang-undang Energi menjadi Undang-undang Energi pada tanggal 15 Oktober 1978 dalam bentuk yang sudah banyak diperlunak. Dalam bentuknya yang semula Presiden Carter mengharapkan akan dapat menghemat impor sebanyak 4,5 juta barrel sehari pada tahun 1985, tetapi Kongres hanya menyetujui penghematan berjumlah 2,5 juta barrel per hari.¹ Undang-undang tersebut jelas akan memungkinkan pulihnya kesehatan nilai US Dollar dari kelemahannya.

Pelbagai usaha telah dilakukan oleh negara-negara lain yang berkepentingan dengan stabilnya nilai tukar US Dollar, juga oleh Pemerintah Amerika Serikat sendiri. Tetapi hasilnya belum memuaskan. Pada akhirnya Presiden Carter pada hari Rabu 1 Nopember 1978 telah mengumumkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat benar-benar secara serius akan mengadakan serangkaian tindakan untuk menolong US Dollar dari kejatuhannya selama ini. Program ini berupa "crash program" anti inflasi dan pemulihan kembali kesehatan nilai US Dollar. Diberitakan bahwa setelah pengumuman tersebut pada umumnya nilai US Dollar di luar negeri mulai membaik dan harga emas mulai menurun.

Beberapa hal yang penting dari program tersebut adalah:²

- i. meningkatkan kerja sama antar bank sentral negara lain dengan bank sentral Amerika Serikat; akan ditingkatkan jumlah persetujuan "swap" dengan bank-bank sentral Jerman Barat, Swiss dan Jepang dari US\$ 7,6 milyar menjadi US\$ 15 milyar guna memungkinkan bank sentral Amerika Serikat melakukan pinjaman jangka pendek;

1 *Business News*, 18 Oktober 1978

2 *Kompas*, 3 Nopember 1978

- ii. Departemen Keuangan Amerika Serikat akan mengeluarkan kertas-kertas berharga bernilai maksimum US\$ 10 milyar;
- iii. Amerika Serikat akan meminjam dana IMF sebanyak US\$ 3 milyar dalam mata uang Yen dan D-Mark;
- iv. Amerika Serikat akan menjual SDRs bernilai US\$ 2 milyar untuk mendapatkan mata uang asing, suatu proyek penjualan terbesar sejak terbentuk SDRs dalam tahun 1969;
- v. mulai bulan Desember 1978 Departemen Keuangan Amerika Serikat akan mengadakan pelelangan emas bulanan yang ditingkatkan sedikitnya 1,5 juta troy ounce per bulan dibandingkan dengan 300.000 troy ounce per bulan sebelum Nopember ini, dan 750.000 troy ounce untuk bulan Nopember;
- vi. suku bunga bank sentral New York dinaikkan dari 8,5% menjadi 9,5% dan diharapkan bank-bank sentral lainnya di Amerika Serikat mengikuti kebijakan ini;
- vii. ratio cadangan deposito jangka panjang akan dinaikkan sebesar 2% dalam bentuk sertifikat bernilai US\$ 100.000 ke atas, dengan tujuan untuk mengendalikan kecepatan pertumbuhan kredit bank-bank yang pada gilirannya memperlunak laju pertumbuhan inflasi.

Dengan tindakan drastis tersebut posisi US Dollar belum bisa diharapkan kuat kembali dalam waktu yang cepat. Juga masih harus dipertanyakan dapatkah Amerika Serikat dan negara-negara lainnya melawan kekuatan-kekuatan spekulatif di bursa valuta asing internasional. Sementara itu faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi neraca pembayaran Amerika Serikat belum pula segera bisa diatasi. Akan tetapi walau bagaimanapun juga Pemerintah Amerika Serikat harus secara serius mengambil tindakan drastis mengingat inflasi dalam

negeri Amerika Serikat kian menunjukkan perkembangan yang mencemaskan. Apabila inflasi tidak bisa dicegah diperkirakan akan membawa resesi ekonomi dalam negeri Amerika Serikat di tahun yang akan datang (1979). Pengangguran juga menunjukkan perkembangan yang menaik. Semuanya ini telah menimbulkan pesimisme di kalangan dunia bisnis sehingga dikuatirkan akan membikin lesu investasi dalam negeri. Sebelumnya Dollar yang goncang itu tampaknya belum ditanggapi serius oleh Pemerintah Amerika Serikat itu sendiri. Amerika Serikat sebelumnya mungkin berpendirian bahwa faktor yang lebih banyak mempengaruhi kegoncangan nilai US Dollar justru datangnya dari luar negeri Amerika Serikat.

Akan tetapi masalahnya tidak semudah seperti yang digambarkan di muka, mengingat adanya "fungsi ganda" (dual function) dari US Dollar. Walaupun sistem moneter internasional yang berlaku sekarang ini sudah meninggalkan "aturan permainan Bretton Woods", US Dollar masih disukai sebagai mata uang dagang secara internasional. Dengan demikian seharusnya nilai US Dollar tetap stabil. Akan tetapi di lain pihak US Dollar menjalankan fungsinya juga untuk kepentingan ekonomi dalam negeri Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat sekarang sedang mengejar tujuan untuk mencapai pertumbuhan yang cepat, mencapai stabilisasi serta perluasan kesempatan kerja secara penuh (full employment). Melaksanakan fungsi dalam negeri inilah yang menyebabkan bahwa tabrakan sering terjadi yaitu apabila US Dollar juga harus memenuhi fungsinya sebagai mata uang perdagangan internasional. Di satu pihak, sebagai mata uang dagang internasional, US Dollar harus dipertahankan stabil, tetapi di lain pihak kebijakan ekonomi dalam negeri Amerika Serikat sering mengakibatkan US Dollar sebagai mata uang dagang internasional menjadi tidak stabil.

Jadi, dengan demikian perlu direnungkan bahwa kebijakan ekonomi dalam negeri suatu bangsa apakah sama sekali

terpisah, tidak punya pengaruh, apabila di lain pihak diperkenalkan sistem nilai tukar mengambang ("floating exchange rates system"). Perlu pula direnungkan kemungkinan adanya hubungan antara kegoncangan nilai tukar US Dollar dan sistem nilai tukar mengambang yang mulai dikenal luas sejak tahun 1973 di antara negara-negara industri maju. Sementara orang menyangsikan keberhasilan sistem nilai tukar mengambang.

PENUTUP

Masih terlalu pagi untuk mengatakan baik tidaknya sistem "floating rates" dalam menjalankan tugasnya. Krisis Dollar yang belakangan ini muncul kembali yang situasinya cukup berlarut-larut, merupakan batu ujian bagi keberhasilan sistem tersebut.

Di dalam sistem "floating rates" hambatan-hambatan politis bisa diatasi. Dengan perkataan lain, di dalam sistem tersebut tidak diperlukan lagi "mata uang dunia". Oleh karenanya tidak diperlukan lagi pengaturan tentang jumlah uang beredar dunia (world money supply). Dalam hal ini seolah-olah berlaku sistem "barter". Akan tetapi dalam keadaan seperti itu biasanya akan menghambat perluasan transaksi perdagangan internasional dan penggunaan sumber-sumber daya dunia menjadi semakin tidak efisien.

Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa eksperimen dengan sistem nilai tukar mengambang benar-benar suatu bencana. Mungkin sistem ini sangat cocok bagi negara-negara industri kuat seperti Jepang, Amerika Serikat dan Jerman Barat, tetapi belum tentu bermanfaat bagi negara-negara industri maju yang relatif lemah, lebih-lebih mungkin tidak cocok bagi negara-negara berkembang. Hal ini semua patut kita renungkan lebih jauh.

HUBUNGAN-HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA — AMERIKA SERIKAT

R.B. SUHARTONO

Dewasa ini tiada isyu-isyu penting dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Selama tujuh tahun terakhir, perdagangan dua-arah terus berkembang, dari sekitar US\$500 juta tahun 1972 menjadi US\$ 4.000 juta, tahun 1978. Amerika Serikat juga menjadi semakin penting sebagai pasaran produk-produk Indonesia: bagian ekspor ke Amerika Serikat dari seluruh ekspor Indonesia meningkat dari 14-15% tahun 1972-1973 menjadi 28-29% tahun 1976-1977.

Akan tetapi isyu-isyu dapat timbul di hari depan sehubungan dengan berubahnya keadaan. Secara paradoks, issue-issue penting kiranya akan timbul apabila dua kondisi — yang masing-masing dan secara terpisah diinginkan — dipenuhi secara simultan. Yang dimaksud ialah pertama meningkatnya dan semakin kuatnya ikatan ekonomi antara kedua negara, dan kedua keberhasilan Indonesia dalam pembangunan ekonominya yang mendatangkan suatu pergeseran struktural dan oleh sebab itu juga perubahan-perubahan dalam komposisi ekspornya.

Dari sudut pandangan ini saya lebih senang membicarakan isyu-isyu yang kiranya akan timbul, dalam konteksantisipasi masalah-masalah yang timbul. Secara demikian diharapkan bahwa kita dapat mengantisipasi, dan tidak dilanda kejadian-kejadian, sehingga kita dapat menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus lebih didasarkan atas pertimbangan yang strategis dan lebih luas dari pada atas tanggapan ad hoc atas gejala-gejala jangka pendek semata-mata.

PERDAGANGAN

Seperti disebutkan di atas, perdagangan dua-arah antara tahun 1972 dan 1978 sangat meningkat. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat meningkat dua belas kali lipat, dari sekitar US\$265 juta tahun 1972 menjadi sekitar US\$3.200 juta tahun 1978. Di lain pihak, impor dari Amerika Serikat meningkat jauh kurang cepat, dari di bawah US\$245 juta tahun 1972 menjadi US\$ 810 juta lebih tahun 1978. Sesuai dengan itu, maka surplus perdagangan kecil dan defisit ringan tahun 1972 dan 1973 berubah menjadi suatu surplus US\$ 970 juta pada tahun 1974, dan surplus ini terus meningkat sampai mencapai US\$ 2.400 juta tahun 1978.

Dengan semakin kuatnya ikatan ekonomi, surplus perdagangan kiranya akan meningkat juga, khususnya kalau ekspor LNG jadi dilaksanakan. Sedangkan kemungkinan besar ekspor akan terus meningkat, tidaklah mudah membayangkan bahwa impor dari Amerika Serikat akan meningkat secara dramatis, begitu rupa sehingga selisih perdagangan dapat dikurangi, paling tidak dalam keadaan sekarang ini dan atas dasar kecenderungan yang lampau.

Amerika Serikat boleh jadi membiarkan meningkatnya defisit perdagangan dengan Indonesia pertama-tama karena pendapatan bersih yang besar dari minyak dan pola ekspor Indonesia sekarang ini. Dewasa ini impor Amerika Serikat dari Indonesia sebagian besar terdiri atas minyak mentah dan produk-produk primer lain, dan semuanya itu termasuk jenis komoditi yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri Amerika Serikat dan tidak mengancamnya.

Pada saat ini ekspor manufaktur Indonesia ke Amerika Serikat adalah sangat sedikit. Dalam kenyataan, berdasarkan klasifikasi SITC, ekspor barang-barang manufaktur Indonesia adalah kurang dari 1% seluruh ekspornya. Akan tetapi dengan keberhasilan Repelita III yang sedang berjalan ini, situasinya kiranya akan berubah. Karena telah dinyatakan sebagai suatu

sasaran, bahwa dalam periode rencana nilai ekspor non minyak harus melebihi nilai ekspor minyak; untuk mencapai sasaran ini, ekspor barang-barang manufaktur harus meningkat secara berarti. Kemungkinan ini ada karena keuntungan Indonesia dalam hal industri padat energi atau karya maupun industri yang didasarkan atas sumber-sumber daya alam meningkat.

Kalau semakin kuatnya ikatan ekonomi — dari sudut pandangan Indonesia — mendatangkan ekspor barang-barang jadi yang berarti ke Amerika Serikat, dapat timbul isyu-isyu yang dapat mengubah seluruh gambaran. Karena tidak peduli betapa marginallah nilainya dari sudut pandangan seluruh ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, ekspor manufaktur bisa dilihat sebagai merugikan industri-industri Amerika Serikat tertentu, juga terlepas dari betapa kecil jumlahnya dibandingkan dengan produksi Amerika Serikat.

Defisit-defisit perdagangan yang besar dan meningkat rupanya tidak menjadi dan kiranya juga tidak akan menjadi isyu-isyu penting, selama defisit-defisit Amerika Serikat sesuai dengan struktur impor Amerika Serikat dari Indonesia sekarang ini. Kalau Indonesia berhasil dalam usaha pembangunannya, maka bersama-sama dengan tahap pembangunan yang lebih tinggi struktur ekspornya akan berubah menuju lebih banyak barang-barang manufaktur. Dalam perkembangan ini, dapat dibayangkan bahwa dalam persepsi rakyat Amerika Serikat ekspor manufaktur Indonesia — dan bukan apa yang dalam kenyataan dan secara fundamental adalah suatu ketidakseimbangan struktural — akan diberi bobot yang jauh lebih besar dalam menyebutkan sebab defisit.

Kalau skenario ini tepat, ada bahaya bahwa tanggapan ad hoc Amerika Serikat akan sangat di luar proporsi dengan masalah yang dihadapi, dan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan perdagangan yang lebih besar antara kedua negara. Mungkin pantas dipertimbangkan apakah persepsi bahaya itu lebih semu dari pada nyata, dan langkah-langkah mana harus diambil untuk mencegahnya.

Suatu segi lain perlu dicatat sehubungan dengan perkembangan mendatang Indonesia. Dengan perkembangan sektor manufakturing secara progresif, lebih banyak dari kebutuhan Indonesia akan barang-barang manufaktur dapat dihasilkan di dalam negeri. Kemungkinan besar Pemerintah akan secara aktif menganut suatu kebijaksanaan "belilah barang dalam negeri". Ini mungkin meliputi permintaan kepada negara-negara donor agar mengijinkan nilai tambahan pembuatan lokal yang lebih besar dalam komponen-komponen proyek-proyek bantuan mereka. Kebijaksanaan ini bisa menurunkan pertumbuhan impor barang-barang manufaktur dari Amerika Serikat.

Sudah barang tentu benar di lain pihak bahwa perkembangan progresif sektor manufakturing Indonesia akan mengakibatkan kebutuhan-kebutuhan impor yang lebih besar untuk manufaktur, khususnya barang-barang modal. Akan tetapi harus dicatat, bahwa secara mutlak nilai impor Indonesia dari Amerika Serikat terus meningkat, tetapi bagiannya dari seluruh impor cenderung untuk menurun, dari 18,7% tahun 1973 menjadi 11,7% tahun 1978.

SIKAP PROTEKSIONIS

Sebagai keseluruhan terjadi suatu liberalisasi umum dalam perekonomian dunia. Putaran Kennedy (Kennedy Round) meliputi suatu pemotongan rata-rata 30% dalam tarif-tarif untuk barang-barang manufaktur yang dikenai bea masuk. Keuntungannya secara otomatis diperluas sampai negara-negara berkembang berdasarkan ketentuan bangsa yang paling diistimewakan tanpa tuntutan pembalasan (reciprocity) penuh dari pihak mereka. MTN yang baru-baru ini diadakan meliputi suatu pemotongan tambahan yang substansial antara 30 dan 35%, biarpun tingkat rata-rata tarif untuk barang-barang manufaktur yang dikenai bea masuk di negara-negara OECD telah sangat rendah, sekitar 10%.

Akan tetapi untuk kasus-kasus yang khusus gambarannya adalah berlainan sama sekali. Masalahnya adalah sangat penting untuk negara-negara berkembang karena ekspor barang-barang manufaktur mereka terpusat pada relatif sedikit kategori. Multi-Fiber Arrangement tidak mencegah Amerika Serikat memperketat kuotanya atau memaksakan kuota baru untuk membatasi ekspor tekstil dan pakaian dari negara-negara berkembang. Terdapat pula pengaturan-pengaturan pemasaran teratur (OMA) yang membatasi ekspor sepatu dan pesawat-pesawat televisi.

Amerika Serikat memberikan keringanan ketentuan untuk lolos kepada produsen-produsen dalam negeri dengan meningkatkan tarif-tarif impor untuk sementara waktu. Bahkan dalam kasus-kasus di mana kerugian bagi produsen-produsen domestik tidak terbukti, bea-bea masuk imbalan Amerika Serikat digunakan. Perlindungan diskriminatoris terhadap ekspor manufaktur negara-negara berkembang adalah jelas.

Di lain pihak harus ditekankan bahwa Amerika Serikat berusaha membawa perundingan-perundingan perdagangan internasional pada suatu penyelesaian yang berhasil, yang bisa berarti suatu perkembangan penting. Tetapi pada tahap ini harus dicatat dua hal yang penting.

Pertama, formula penurunan tarif berdasarkan MTN merupakan suatu diskriminasi terhadap negara-negara berkembang: sementara produk ekspor yang penting bagi negara-negara ini, khususnya tekstil dan sepatu, dikecualikan atau diturunkan tarifnya jauh lebih sedikit dari pada pemotongan tarif lain-lain. Ketidakwajaran ini jelas bila disejajarkan dengan kenyataan bahwa tarif-tarif yang berlaku untuk produk-produk ini — antara 15% dan 30% — umumnya lebih tinggi dari pada tarif rata-rata (10%) negara-negara OECD.

Kedua, kategori-kategori produk ekspor ini dikenakan

pembatasan-pembatasan kuantitatif, dan MTN tidak menangani persoalan ini. Dalam kenyataan, MTN tidak akan menggulung atau membongkar hambatan-hambatan nontarif yang sudah berlaku. Industri tekstil Amerika, yang telah menikmati banyak perlindungan, jelas minta dan mendapat lebih banyak perlindungan nontarif sebagai imbalan bagi dukungan mereka untuk perundang-undangan yang dibutuhkan guna menyempurnakan MTN.

Sebagai tambahan dapat disebutkan bahwa program penyesuaian dagang Amerika Serikat rupanya tidak menunjang usaha penyusunan kembali yang cepat. Keuntungan-keuntungan diberikan kepada para pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka dari industri-industri yang dirugikan oleh impor, dan kepada firma-firma, tetapi hanya untuk modernisasi dan tidak untuk penutupan. Ini adalah berlainan misalnya dengan Undang-undang Industri Katun Inggris, berdasarkan mana firma-firma bisa mendapatkan kompensasi untuk penutupan, atau bahkan dengan program-program Biro Penyesuaian Ekonomi (Office of Economic Adjustment) Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yang memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat setempat yang dirugikan oleh penutupan pangkalan-pangkalan militer. Sebagai akibatnya bisa ditanggihkan penutupan yang tak terhindarkan yang dituntut oleh berubahnya keuntungan komparatif, sedangkan diperkirakan bahwa biaya perlindungan setiap pekerjaan di industri-industri serupa itu secara kasar mencapai US\$ 50.000 per tahun.

Indonesia, karena tidak termasuk kelompok pengeksport penting barang-barang manufaktur, masih bisa mempunyai untuk memilih kategori-kategori barang-barang manufaktur tertentu yang ekspornya ke Amerika Serikat kiranya tidak akan menimbulkan sentimen proteksionis yang kuat. Akan tetapi sulit mengetahui pada saat ini tanda-tanda yang bisa menunjukkan barang-barang manufaktur mana bisa masuk kategori ini.

Suatu survey tahun 1978, yang disponsori oleh organisasi-

organisasi pengecer Amerika Serikat, menemukan bahwa produk-produk konsumsi (kecuali pangan dan mobil) yang diimpor dari Asia dan Amerika Latin, rata-rata dijual eceran di Amerika Serikat dengan harga 16% lebih rendah dari pada barang-barang buatan dalam negeri yang sama mutunya. Barang-barang ini pada pokoknya dipakai oleh kelompok-kelompok pendapatan yang lebih rendah, dan impornya dapat mengurangi dampak inflasioner atas rakyat miskin maupun meningkatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar. Namun, hal itu tidak menakut-nakuti tindakan-tindakan proteksionis.

Perlindungan biaya-biaya juga tidak menakut-nakuti diambilnya tindakan-tindakan pembatasan. Diperkirakan bahwa dari tahun 1973 sampai 1977 beban akibat tindakan-tindakan proteksionis itu adalah US\$ 1.250 juta dalam baja, US\$ 1.200 juta dalam sepatu, US\$ 400 juta dalam daging, US\$ 660 juta dalam gula, dan US\$500 juta dalam pesawat-pesawat televisi; untuk barang-barang ini saja biaya bagi para konsumen mencapai US\$ 4.000 juta lebih.

Pertimbangan ekonomi jelas tidak mempunyai banyak bobot. Kepentingan konsumen dan rakyat miskin pun tidak. Tekanan-tekanan dari serikat-serikat buruh dan kelompok-kelompok produsen rupanya merupakan faktor predominan. Akan tetapi akan sia-sialah bagi Indonesia untuk mengantisipasi ekspor barang-barang manufaktur mana kiranya tidak akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok ini seperti dapat dilihat dalam kasus ekspor baja Taiwan.

Meningkatnya ikatan-ikatan ekonomi yang mendatangkan ekspor barang-barang manufaktur yang berarti ke Amerika Serikat mengandung bahaya menimbulkan sentimen proteksionis, khususnya karena neraca perdagangan pada dasarnya ditandai ketidakseimbangan struktural. Di lain pihak, karena Indonesia bertekad untuk mengembangkan ekspor barang-barang manufakturnya, mungkin berguna kalau pihak Amerika Serikat

dapat menjelaskan pendekatan yang paling baik bagi Indonesia untuk mencapai sasaran ini tanpa menimbulkan isu-isu perdagangan yang menjengkelkan.

CATATAN PENUTUP

Pembahasan sejauh ini sudah barang tentu menderita akibat tekanan terlalu besar atas kecenderungan dan pelaksanaan perdagangan yang lampau. Impor Indonesia dari Amerika Serikat mungkin dapat meningkat secara dramatis sehingga selisih perdagangan tidak akan muncul ke permukaan bahkan kalau Indonesia banyak mengeksport barang manufaktur ke Amerika Serikat.

Saya pribadi merasa bahwa impor dari Amerika Serikat kiranya tidak akan meningkat secara dramatis kecuali kalau investasi langsung Amerika Serikat di Indonesia, khususnya di sektor manufakturing, juga meningkat secara dramatis.

Angka-angka kumulatif untuk investasi-investasi asing yang disetujui dari Juni 1967 sampai Mei 1979 menunjukkan bahwa dalam keseluruhan Amerika Serikat adalah nomor tiga sesudah Jepang dan Hong Kong. Tetapi investasi dari Amerika Serikat yang disetujui (sebesar US\$ 410 juta) adalah lebih dari separuh investasi Hong Kong (US\$ 750 juta) dan sekitar 17% investasi Jepang (US\$ 2.400 juta), sedangkan angka itu hanyalah sekitar 5,5% seluruh investasi asing di Indonesia.

Hanya sekitar 42% investasi Amerika Serikat itu dilakukan dalam sektor manufakturing, dibandingkan dengan 85% lebih dalam kasus Jepang. Sebagai akibatnya, angka Amerika Serikat adalah kurang dari 4% dari seluruh investasi asing yang disetujui untuk sektor manufakturing.

Dengan sendirinya investasi di sektor manufakturing, khususnya pada tahap pembangunan Indonesia sekarang ini,

akan meningkatkan kebutuhan akan barang-barang modal dan barang-barang setengah jadi. Dengan demikian lebih banyak investasi Amerika Serikat di sektor manufakturing dapat banyak meningkatkan impor dari Amerika Serikat. Lagi pula, ekspor manufaktur Indonesia yang melibatkan firma-firma Amerika Serikat kemungkinan akan menghadapi lebih sedikit sentimen proteksionis di Amerika Serikat.

Meningkatnya investasi Amerika Serikat di sektor manufakturing boleh jadi merupakan satu-satunya cara untuk memperkuat ikatan-ikatan ekonomi antara kedua negara, yang pada waktu yang sama dapat disesuaikan dengan usaha Indonesia untuk mencapai suatu tahap pembangunan yang lebih tinggi.

MULTINATIONAL CORPORATION: BISNIS INTERNASIONAL DAN ASEAN

J. PANGLAYKIM

Dalam kegiatan bisnis internasional tidak dapat dihindarkan adanya "Multinational Corporation"* atau "Transnational Corporation"*. Kedua istilah ini akan dipergunakan secara bergantian tanpa mengadakan pembedaan di antara keduanya dalam pembahasan selanjutnya. Di samping kedua istilah di atas ada pula yang menggunakan istilah "Multinational Enterprises"* seperti dikemukakan oleh Neil Hood dan Stephen Young dalam bukunya: "The Economics of Multinational Enterprise". Menurut Hood dan Young MNE:

"..... is a corporation which owns (in whole or in part), controls and manages income-generating assets in more than one country. In so doing it engage in international production, namely production across national boundaries financed by foreign direct investment".¹

Sedangkan George Modelski menyunting (to edit) dari kumpulan karangan dalam buku "Transnational Corporations and World Order-Readings in International Political Economy" perumusan MNC: "..... as a network of enterprises that

* Untuk pembahasan selanjutnya istilah "Multinational Corporation" ditulis MNC, istilah "Transnational Corporation" ditulis TNC dan istilah "Multinational Enterprises" ditulis MNE.

¹ Neil Hood and Stephen Young, *The Economics of Multinational Enterprise*, Longmans, London, 1973

controls activities and assets in more than one state, and most often three or more states.”¹

Istilah MNC dipergunakan oleh United Nations (UN) tetapi setelah pertemuan "The Group of Eminent Persons" diusulkan oleh Economic and Social Council untuk menggunakan istilah TNC. Hal ini disebabkan istilah TNC mencerminkan: "..... the strong feeling that the word transnational would better convey the notion that these firms operate from their home bases across national frontiers." Dengan demikian sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang prinsipial antara keduanya, sehingga dalam kertas kerja ini dapat dipergunakan kedua istilah tersebut secara bergantian.

PERANAN MNC/TNC

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa kehadiran MNC/TNC merupakan suatu kenyataan yang tak dapat dihindarkan dalam kegiatan bisnis internasional, termasuk investasi langsung, internasionalisasi produksi, pemasaran (marketing), pembiayaan, informasi, dan sebagainya.

Dalam kata pengantarnya, Modelski mengemukakan bahwa peranan MNC cukup penting dalam perkembangan pola bisnis internasional. Hal tersebut dikemukakannya sebagai berikut: "In discussions of transnational corporations, we should bear in mind that their role as important world structures will help to determine the future of world order, and that the world order of tomorrow will in turn shape the future of transnational enterprises." Dengan perkataan lain, MNC akan turut membantu merumuskan kembali pola bisnis internasional setelah disesuaikan dengan perubahan-perubahan struktur kekuasaan internasional, dan sebaliknya pola bisnis internasional yang berubah juga akan turut menentukan hari depan MNC.

¹ George Modelski, *Transnational Corporations and World Order-Readings in International Political Economy*, S.F.W.H. Freeman and Company, 1979

MNC/TNC Pada Masa Perdagangan Bebas

Sebelum mulai dengan pembahasan mengenai peranan MNC/TNC di masa yang akan datang, diperlukan suatu "flashback" mengenai peranan MNC/TNC pada masa perdagangan bebas yang dianggap cukup instruktif.

Dalam dasawarsa 1960-an perekonomian dan bisnis internasional bersandar pada dua tonggak (two pillars). Adanya perdagangan bebas dan nilai tukar tetap (fixed exchange rate) serta bantuan luar negeri yang cukup banyak (sebagian dinikmati oleh MNC-MNC) mengakibatkan perkembangan MNC/TNC pada masa kini sangat berarti. Kestabilan politik masa kini yang ditimbulkan oleh triangle of economic power antara Eropa Barat, Jepang dan Amerika serta belum adanya penurunan kredibilitas kepemimpinan Amerika, sangat membantu perkembangan perdagangan dan bisnis internasional secara pesat. Di samping itu mobilitas modal, manajemen dan teknologi telah banyak membantu dalam perkembangan MNC/TNC.

Robert Gilpin berpendapat bahwa: "..... Throughout history the larger configuration of world politics and state interests have in large measure determined the framework of the international economy. Succeeding imperial and hegemonic powers have sought to organize and maintain the international economy in term of economic and security interest."¹ Berdasarkan perspektif di atas Gilpin berpendapat bahwa ekonomi internasional (bisnis internasional) dewasa ini seakan-akan diciptakan oleh Amerika sebagai kekuatan yang dominan dalam ekonomi dan militer.

Sesudah Perang Dunia II, muncul usaha-usaha untuk menciptakan suatu sistem perdagangan dan hubungan moneter yang bersifat universal dan liberal. Setelah tahun 1947

1 Robert Gilpin, "Three Models of Future", *International Organization*, vol. 29/1, 1975

perekonomian internasional mulai bangkit kembali. Melalui Marshall Plan, Jerman Barat dan negara-negara Eropa Barat lainnya telah berhasil memulihkan kembali perekonomian yang hancur akibat Perang Dunia II. Demikian pula Jepang telah berhasil menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia setelah berhasil mendayagunakan kembali potensi-potensi dalam bidang ekonomi dan bisnis.

Pemulihan dan perkembangan ekonomi dan bisnis internasional (ditinjau dari sudut politik ekonomi) didasarkan pada hubungan segi tiga antara tiga pusat negara industri nonkomunis: Amerika, Eropa Barat (yang dipelopori oleh Jerman Barat) dan Jepang. Dengan adanya proteksi nuklir dan aliansi militer antara Amerika, Eropa Barat dan Jepang, maka negara-negara Eropa Barat dan Jepang mendapat dorongan dan bantuan untuk mengembangkan diri dan akhirnya berhasil mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi. Jepang mendasarkan struktur ekonominya pada prinsip "export led economy", dan pada batas-batas tertentu berlaku pula untuk Jerman Barat, yang telah berhasil memasuki pasar-pasar di Amerika, negara-negara MEE dan negara-negara lain di Asia, Amerika Latin dan lain-lain.

Dewasa ini yang menjadi sebab utama dari pertumbuhan bisnis internasional yang pesat (termasuk pertumbuhan MNC sebagai salah satu mekanisme pelaksanaan) dirumuskan oleh Gilpin sebagai berikut:

"Today, the triangular relationship of the non-communist industrial powers upon which the world economy has rested is in disarray. The signs of decay were visible as early as the middle 1960's, when President John F. Kennedy's grand design failed to stem the coalescence of an inward-looking European economic bloc and to achieve its objective of an economic and political community extending from Scandinavia to Japan and pivoted on the United States."¹

1 *Ibid.*

Selanjutnya Gilpin membahas secara singkat mengenai kesulitan-kesulitan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh Amerika berhubung bisnis internasional dan sistem moneter yang berlaku tidak menguntungkan perekonomian dan bisnis Amerika. Sehubungan dengan itu Gilpin mengemukakan mengenai tindakan-tindakan Presiden Nixon yang dimulai pada tanggal 15 Agustus 1971, untuk merumuskan kebijaksanaan ekonomi luar negeri. Kebijaksanaan tersebut meliputi: (i) pajak impor, (ii) meniadakan konvertibilitas dollar (terhadap emas?), (iii) devaluasi dollar pada bulan Desember 1971 dan Pebruari 1973, (iv) mengubah fixed exchange rate menjadi floating exchange rate dan (v) permulaan dari suatu rangkaian negosiasi-negosiasi untuk menciptakan sistem perdagangan dan moneter baru.

Perkembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa Jepang merasa seakan-akan tidak diikutsertakan atau dimintakan pendapat mengenai kebijaksanaan terhadap RRC, kebijaksanaan dalam bidang ekonomi dan kebijaksanaan "detente" yang antara lain memulihkan hubungan diplomatis antara Amerika dengan RRC dan sebagainya. Jepang merasa seolah-olah "ditinggalkan" atau sekurang-kurangnya merasa "dikucilkan" oleh teman.

Pada masa perdagangan bebas yang berdasarkan atas tiga kekuatan yakni kekuatan ekonomi Eropa Barat dan Jepang serta kekuatan militer Amerika, MNC/TNC dapat berkembang dengan bebas dan bahkan dapat menarik manfaat dari adanya "bantuan luar negeri (foreign aid)" baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerukunan politis antara ketiga kekuatan industri (industrial powers) dari negara-negara nonkomunis tampaknya menunjukkan keretakan dan perselisihan-perselisihan, walaupun telah dicapai kesepakatan antara para pemimpin negara industri dalam Summit Tokyo 1979 yang mencerminkan tanggung jawab mereka terhadap ekonomi internasional.

Suatu kenyataan yang harus dihadapi oleh MNC/TNC adalah dunia internasional yang diliputi oleh berbagai tindakan proteksionistis seperti diterimanya prinsip OMAS (organized Marketing Agreements) atau "Organized Free Trade". Hal ini berarti bahwa dari sudut politis (manajemen), negara kita melihat keretakan dan pertentangan di antara birokrasi tiga kekuatan tersebut. Dewasa ini masing-masing negara tersebut sedang mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam negeri. Apabila kepentingan nasional seperti kesempatan kerja (employment), surplus, defisit, inflasi dan sebagainya berada dalam "bahaya", tampaknya dapat terjadi "konfrontasi" (lihat perundingan-perundingan antara para politisi/birokrat Amerika, Jepang dan MEE). Apakah "konfrontasi/ketegangan" seperti dikemukakan di atas dapat terjadi juga dalam kegiatan dan sistem operasi MNC/TNC. Suasana "panas" pada tingkat politisi/birokrasi baik secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi MNC/TNC, akan tetapi untuk mengatasi suasana "politik yang panas" MNC/TNC tidak akan mengambil sikap yang konfrontatif tetapi akan lebih pragmatis. Merupakan suatu pertanyaan yang cukup menarik, sampai seberapa jauh perkembangan MNC dalam suasana bisnis internasional yang terus berubah sehingga dapat ditarik suatu "kolusi" (adanya kerja sama antara dua atau lebih MNC/TNC). Yang dewasa ini dapat diteliti adalah investasi MNC Jepang dan Eropa Barat di negara-negara industri seperti Eropa Barat dan Amerika. Yang terlihat cukup menyolok adalah investasi langsung MNC yang berasal dari Eropa Barat dan Jepang ke Amerika dalam jumlah yang cukup besar. Akhir-akhir ini bank-bank internasional seperti Chartered Bank (Inggeris), Hongkong Shanghai Bank (Inggeris), bank-bank Jerman Barat memasuki industri perbankan Amerika melalui pembelian (acquisition) bank-bank Amerika. Kemungkinan besar kebijaksanaan bank-bank internasional non-Amerika mengadakan gerakan-gerakan tersebut karena harus mengikuti jejak para MNC-nya yang bergerak di bidang manufacturing dan sebagainya. "Invasi" ini tidak lepas dari

pengamatan mereka yang bertugas untuk mengawasi masalah perbankan. Dengan sendirinya akan terdapat gerakan-gerakan yang menghendaki agar "trend" dari "acquisition" bank-bank di Amerika ditentukan oleh peraturan-peraturan baru, seperti yang telah dialami oleh Hongkong Shanghai Bank yang hendak menguasai salah satu bank besar di Amerika (Minland Bank).

PERBEDAAN-PERBEDAAN MNC BARAT DAN JEPANG

Untuk mendapatkan pengertian mengenai MNC Jepang, Eropa Barat dan Amerika, khususnya antara Barat dan Jepang, sebaiknya diadakan semacam peninjauan sifat-sifat MNC/TNC yang merupakan pusat-pusat kekuatan ekonomi. Ada beberapa titik pandangan yang berbeda-beda, antara lain mungkin disebabkan oleh perkembangan sejarah, struktur perekonomian, cara/bentuk manajemen, cara berorganisasi dan strategi nasional.

MNC Barat

Dalam MNC/TNC Barat kita membahas antara lain mengenai MNC/TNC yang berasal dari Eropa Barat dan Amerika. Perkembangan MNC/TNC Barat didasarkan pada struktur perekonomian yang dikenal sebagai "domestic demand led economy". Perkembangan permintaan dalam negeri merupakan salah satu dasar perkembangan mereka, dan kemudian mereka memperhatikan kemungkinan ekspor ke pasar internasional. Misalnya Philips memulai usahanya berdasarkan peningkatan permintaan di dalam negeri dan kemudian berkembang menjadi salah satu MNC yang besar. Keberhasilan MNC/TNC Barat disebabkan karena mereka dapat memadukan secara tepat tiga segi kekuatan: (i) manajemen/organisasi, (ii) akses ke pasar uang dan modal dan (iii) teknologi. Tiga kekuatan ini merupakan ciri MNC/TNC Barat, karena dalam struktur perekonomian Barat sebagian besar merupakan usaha swasta,

dan campur tangan atau partisipasi pemerintah dianggap sebagai intervensi yang tidak dikehendaki. Sehubungan dengan partisipasi pemerintah dalam MNC Barat mungkin sekali banyak terdapat nuansa. Dapat diperkirakan bahwa suatu bentuk partisipasi dalam MNC yang berasal dari Perancis dan Jerman Barat tampak lebih jelas dibandingkan dengan negara Eropa Barat lainnya.

MNC Jepang

MNC Jepang mungkin memperlihatkan beberapa ciri khas dibandingkan dengan MNC/TNC Barat. Perlu dicatat di sini bahwa MNC Jepang dewasa ini didasarkan pada sejarah, seperti perkembangan Zaibatsu sebelum Perang Dunia II, yang dibubarkan oleh Jenderal McArthur pada waktu beliau memimpin "pendudukan Jepang" sesudah Perang Dunia II. Seperti Mitsui dan Mitsubishi (yang terkena pembubaran) pada waktu itu Zaibatsu dikuasai oleh sekitar 10-11 kelompok keluarga. Setelah Perang Dunia II semua Zaibatsu dan MNC Jepang lainnya tidak dikuasai lagi oleh kelompok keluarga dan menjadi "public listed company".

Apabila dahulu MNC Jepang yang dikenal sebagai *Sogo Shosha*¹ dikuasai oleh keluarga-keluarga, maka dewasa ini tidak lagi demikian. Penguasa *Sogo Shosha* secara hukum merupakan usaha masyarakat yang terdaftar dalam bursa, tetapi dalam kenyataannya mereka dikuasai oleh perusahaan besar lainnya seperti bank-bank besar, trustee companies, perusahaan asuransi (lihat Table No. 1 dan No. 2). Misalnya salah satu big ten "Marubeni Corporation" yang dimiliki oleh perusahaan besar seperti: (i) lembaga-lembaga keuangan 61,56% (termasuk Fuji

1 Lihat: (i) Alexander K. Young, *The Sogo Shosha: Japan's Multinational Trading Companies*, Westview Press, 1979, (ii) *The 100 Year of History of Mitsui & Co. Ltd.*, published by Mitsui & Co., 1977 (translated by T.I. Elliot), (iii) John G. Roberts, Mitsui, *Three Centuries of Japanese Business*, Weatherhill, 1973, (iv) *The Unique World of The Sogo Shosha*, Marubeni Corporation, 1978, (v) M.Y. Yoshino, *Japan's Multinational Enterprises*, Harvard University Press, 1976

Bank), (ii) perusahaan-perusahaan besar lainnya: 29,47% dan (iii) masyarakat hanya memiliki 8,21% (mungkin kelompok ini terdiri dari para pegawai dan bekas pegawai Marubeni Corporation).

Setelah Perang Dunia II, MNC Jepang merupakan produk strategi nasional Jepang untuk memperoleh kedudukan sebagai salah satu kekuatan ekonomi. Dalam perang militer, Jepang sudah mengalami kekalahan, kehancuran, kekecewaan dan kesedihan, karena itu sekarang perang "ekonomi/bisnis" harus dimenangkan. Hal ini harus dan telah dilakukan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi (high rate economic growth). Dalam strategi nasional, *Sogo Shosha* memegang peranan penting untuk melaksanakan secara konkrit yang telah ditargetkan oleh Badan Perencanaan (Planning Agency) Jepang dan Kementerian Industri dan Perdagangan (MITI). Apa yang telah ditargetkan oleh para birokrat/teknokrat Jepang diterjemahkan oleh *Sogo Shosha* dalam rencana operasional dan diciptakan mekanisme serta organisasi untuk melaksanakannya.

Dalam menterjemahkan target mekanisme operasional dan organisasi untuk melaksanakannya, MNC Jepang telah berhasil memadukan lima kekuatan yaitu: (i) manajemen, (ii) akses modal dengan bantuan penuh dari lembaga keuangan Jepang yang diprakarsai oleh Bank Sentral Bank of Japan, (iii) teknologi (membeli, menyewa, memperbaiki dan sebagainya), (iv) network internasional dari cabang-cabang dan pusat-pusat penjualan, informasi, (v) dukungan pemerintah (MITI, Bank of Japan dan sebagainya). Kelima segi kekuatan ini dalam praktek didukung oleh strategi organisasi seperti Fuyo Group, Daichi Kangyo Group dan sebagainya. Dalam kelompok-kelompok ini terdapat usaha-usaha untuk "menutup diri" terhadap bisnis dengan dunia luar, misalnya apabila Mitsui mendapat proyek besar, maka mesin, asuransi, pengapalan, konsultasi, pembiayaan, marketing, manajemen dan sebagainya hampir seluruhnya dikuasai oleh anggota kelompok. Hal ini merupakan pengelom-

pokan yang sangat efektif sehingga hampir ada kegiatan yang "diambil" oleh pihak luar kelompok.

"Network" dan "dukungan pemerintah" pada tahap integrasi dalam kelompok-kelompok tersebut merupakan suatu perpaduan kekuatan yang terbukti cukup ampuh. Hal ini merupakan salah satu keunggulan MNC/TNC Jepang dibandingkan dengan MNC Barat lainnya. Sudah sangat banyak MNC Barat yang terdorong dari pasar tradisional yang dikuasainya baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Persaingan yang sudah lama dirasakan ini antara lain merupakan salah satu penyebab ketegangan dan suasana panas pada tingkat politik dan birokrasi. Lobby-lobby MNC Barat serta "group interest" sudah berlangsung dan menunjukkan hasil pada tingkat politik.

MNC DI NEGARA-NEGARA DUNIA KETIGA

Pola perkembangan MNC Jepang telah memberikan inspirasi pada negara-negara lain, seperti Korea Selatan dengan terbentuknya usaha-usaha Hyundai, Lucky Group, Samyong dan sebagainya, Singapura dengan Temasek Holding dan sebagainya, Malaysia dengan Pernas, Sime Darby dan sebagainya (lihat karangan kami untuk East-West Centre, *Third World MNC in ASEAN, South Korea and Hongkong: A Descriptive Picture*, September, 1979) dan akhir-akhir ini Thailand sudah menciptakan "*Thailand Sogo Shosha*" Tiga model atau mashab dalam MNC/TNC.

Perkembangan MNC/TNC telah mengundang banyak pendapat dari para penulis, analis dan sebagainya, sehingga atas dasar tersebut di atas di samping pengamatan kepustakaan dan pemikiran-pemikiran yang diperoleh, maka Gilpin berpendapat bahwa dewasa ini terdapat tiga model/mashab yang melatarbelakangi MNC/TNC yaitu: liberalisme, marxisme dan nasionalisme ekonomi. Dikemukakan oleh Gilpin bahwa ketiga model tersebut merupakan bentuk yang bersifat teoretis.

1. "The Sovereignty-At-Bay Model"

Pencetus pendapat ini adalah Raymond Vernon.¹ Menurut mashab ini, seperti dinyatakan oleh Gilpin: "..... increasing economic interdependence and technological advances in communication and transportation are making the nation state and anachronism. These economic and technological developments are said to have undermined the traditional economic rational of the nation state. In the interest of world efficiency and domestic economic welfare, the nation state's control over economic affairs will continually give way to the multinational corporations, to the Eurodollar market, and to other international institutions better suited to the economic needs of mankind."

MNC dipandang sebagai suatu kesatuan yang dapat mengintegrasikan ekonomi dan bisnis internasional berdasarkan pemikiran-pemikiran idealisme para analis liberal. Mereka dapat menjadi mekanisme/alat efisien untuk mengintegrasikan ekonomi nasional dalam suatu ekonomi internasional. Mereka dapat mengorganisasikan produksi, marketing dan investasi secara global dengan efektif dibandingkan dengan mengorganisasikan pada tingkat nasional. Ekonomi nasional akan masuk ke dalam jalur-jalur interdependensi ekonomi sehingga dapat menarik manfaat yang besar dibandingkan dengan menjalankan usaha sendiri-sendiri pada tingkat nasional.

Secara singkat Gilpin mengemukakan pandangannya mengenai model sebagai "..... the rise of the welfare state and the increasing sensitivity of national governments to the rising economic expectations of their societies have made them dependent upon the benefits provided by a liberal world economic system". Mashab ini menggambarkan dunia internasional di masa yang akan datang akan merupakan suatu

¹ Raymond Vernon, *Sovereignty-At-Bay: The Multinational Spread of United States Enterprises*, New York, 1971

hubungan sukarela dan hubungan kerja sama antara ekonomi yang interdependen. Tujuan utamanya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat untuk kebahagiaan semua. Dunia yang diharapkan adalah dunia yang berkembang menuju ke arah ekonomi jasa dan konsentrasi pada "knowledge-creating" dan "knowledge-processing" dan mengalihkan sebagian besar manufacturing ke negara-negara sedang berkembang. Sistem dunia secara menyeluruh akan terjalin melalui sistem komunikasi yang "sophisticated" termasuk penggunaan komputer-komputer. Negara-negara Barat dan Jepang akan berorientasi ke arah ekonomi jasa dan merupakan suatu pulau yang dikelilingi oleh "labor-intensive global archipelago". Hal ini merupakan suatu bentuk ideal yang indah dan sangat jauh dari kenyataan dan situasi dunia dewasa ini. Dalam model yang berikut, kita akan melihat perbedaan pandangan yang pokok.

2. "Depencia Model"

Model ini mempunyai persamaan analisa dengan model yang pertama, hanya "depencia model" tidak menyetujui bahkan menentang corak "partners-in-development". Model ini melihat adanya suatu tahapan hirarki dan corak eksploitasi tata ekonomi internasional, sedangkan model pertama memperkirakan bahwa pertumbuhan dunia internasional dapat meningkatkan pemerataan pembagian ke negara-negara sedang berkembang yang akan dapat dilakukan melalui mekanisme MNC yang bekerja secara efektif dan efisien. Model depencia berpendapat bahwa pengalihan hasil peningkatan pertumbuhan internasional melalui mekanisme yang sama (MNC/TNC) akan terarah dari negara-negara Dunia Ketiga (underdeveloped periphery) ke pusat-pusat kekuasaan industri, keuangan dan pengambilan keputusan. Mashab ini mempertanyakan apakah yang diperjuangkan oleh model pertama tidak lain daripada suatu bentuk "imperialisme". Sehubungan dengan ini Stephen Hymer¹

1 Stephen Hymer, *The Multinational Corporation and the Law of One Development*, Modelski (ed), lihat catatan kaki no. 3

mengajukan dua hukum perkembangan: (i) hukum yang melihat bertambah besarnya perusahaan multinasional dan (ii) hukum yang melihat adanya perkembangan yang tidak seimbang. Hukum pertama melihat adanya gejala perkembangan perusahaan multinasional yang mengarah pada "giant corporations", sedangkan hukum kedua mengatakan bahwa perkembangan ekonomi internasional menciptakan kemakmuran bersama-sama dengan kemiskinan. Sehubungan dengan ini Gilpin mensitir kata-kata Hymer yang berbunyi sebagai berikut:

"..... a regime of North Atlantic Multinational Corporations would tend to produce a hierarchical division of labor within the firm. It would tend to centralize high-level decision-making occupations in a few key cities in the advanced countries, surrounded by a number of regional sub-capitals, and confine the rest of the world to lower levels of activity and income, i.e., to the status of towns and villages in a new Imperial system. Income, status, authority, and consumption patterns would radiate out from these centers along a declining curve, and the existing pattern of inequality and dependency would be perpetuated. The pattern would be complex just as the structure of the corporation is complex, but the basic relationship between different countries would be one of superior and subordinate, head office and branch office."

Dalam sistem tersebut kita melihat adanya suatu sistem hirarki dan eksploitasi serta pusat-pusat pengambilan keputusan yang terpusat di New York, London, Tokyo dan sebagainya. Model ini melihat dependensi sebagai suatu situasi di mana perekonomian suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh perkembangan dan ekspansi negara lain, karena adanya hubungan yang erat itu. Negara-negara yang dependen tidak dapat menciptakan momentum sendiri untuk melepaskan diri dari hubungan dependensi tersebut.

3. "Merkantilis Model"

Menurut Gilpin, unsur pokok yang dilupakan oleh kedua model terdahulu adalah "nation state". Kedua model pertama melihat bahwa dunia diorganisasikan dan di-manage oleh MNC/TNC yang berasal dari Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, sedangkan model merkantilis mengambil sikap yang

berlawanan dengan kedua model sebelumnya. Model ini lebih mengutamakan kepentingan nasional, yang dinyatakan oleh Gilpin sebagai "..... views the nation state and the interplay of national interests (as distinct from corporate interests) as the primary determinants of the future role of the world economy".¹

Dalam tahun 1960/1970 perkembangan MNC/TNC mulai mengalami kesulitan walaupun tampaknya suasana dalam tahun-tahun tersebut memberikan iklim yang baik pada perkembangan MNC/TNC. Menurunnya "American power" dan timbulnya ketegangan, konflik dan sebagainya di antara negara-negara industri mengakibatkan situasi politik internasional kurang menguntungkan MNC/TNC. Dewasa ini dunia internasional sedang menghadapi persaingan hebat untuk memperoleh "share" dalam pasar internasional, investasi dan sumber-sumber bahan mentah.

Merkantilisme oleh Gilpin dilihat sebagai suatu usaha beberapa pemerintahan untuk mengatur persetujuan ekonomi agar dapat menguntungkan kepentingannya sendiri. Kepentingan ini merupakan aspek domestik (employment, stabilitas harga, inflasi dan sebagainya) atau kebijaksanaan luar negeri (keamanan, kedaulatan dan sebagainya). Pokok pandangan Merkantilisme adalah memberikan prioritas utama pada perekonomian dan politik nasional baru sesudah itu memperhatikan efisiensi perekonomian internasional. Menurut Gilpin, Merkantilisme ingin menguasai berbagai bentuk dan cara, seperti: (i) keinginan untuk mempunyai surplus dalam neraca pembayaran (Jerman Barat, Jepang dan Amerika Latin), (ii) ekspor pengangguran dan inflasi, (iii) mengadakan pengawasan terhadap impor dan ekspor, (iv) memperoleh "market share" di pasar internasional, (v) menstimulasikan teknologi maju dan mengadakan berbagai jenis dan bentuk proteksi untuk industri dalam negeri.

1 David Calleo and Benyamin Rowland, *America and the World Political Economy*, Bloomington, Indiana University Press, 1973

Penulis Merkantilis dapat dibagi dalam dua golongan: (i) yang melihat dari sudut negatif (malevalent) dan (ii) yang melihat dari sudut positif (benign). Kedua golongan ini berpendapat bahwa dunia internasional sedang mengarah pada pembentukan blok regional (EEC, ASEAN, LAFTA dan sebagainya), sedangkan perdagangan internasional, persetujuan moneter dan investasi lebih bersifat in-regional. Regionalisasi hubungan ekonomi menurut Gilpin akan menggantikan pandangan Amerika yang menghendaki adanya "multilateral free trade" dan juga peranan internasional dari dollar serta kekuatan MNC Amerika. Hal ini mungkin sudah berubah setelah Gilpin menulis karangannya, karena peranan dollar yang kuat di dunia internasional sudah mulai menurun dan MNC Amerika sudah terdesak oleh MNC Jepang.

Golongan yang melihat dari sudut negatifnya berpendapat bahwa regionalisasi akan mengarah pada peningkatan konflik di dunia internasional. Tiap-tiap blok yang berpusat pada kekuatan industri seperti Amerika, Eropa Barat, Jepang dan Rusia akan "clash" terhadap "market", "currency" dan "outlet" dalam investasi.

Golongan lain dalam aliran merkantilisme melihat bahwa dengan adanya blok-blok akan membantu menstabilisasikan hubungan ekonomi internasional, di samping itu dapat memberikan dasar yang kuat untuk mencapai suatu tata ekonomi internasional yang teratur dan lebih terarah.

Dewasa ini negara-negara lebih banyak memberikan prioritas untuk mencapai stabilitas di dalam negeri dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengatasi masalah pengangguran daripada memperhatikan masalah-masalah hubungan internasional. Hubungan internasional dilihat sebagai suatu alat untuk melaksanakan kepentingan nasional.

Kesimpulan Gilpin

Proses ke arah pengadaan blok sudah harus diterima sebagai suatu kenyataan. Gilpin berpendapat bahwa:

"In a world economy composed of regional blocs and centers of power, economic bargaining and competition would predominate. Through the exercise of economic power and various trade-offs, each center of the world economy would seek to shift the costs and benefits of economic interdependence to its own advantage. Trade, monetary, and investment relations would be the consequence of negotiations as nation states and regional blocs sought to increase the benefits of interdependence and to decrease costs. This in fact has been the direction of the evolution of the international economy, from a liberal to a negotiated system, since the rise of large and rival economic entities in the latter part of the nineteenth century. Therefore, debate and policy planning today should not focus on economic independence or dependence but on the nature and consequences of economic interdependence."

Sistem Bargaining atau Persaingan

Pada tahun-tahun mendatang berbagai pertemuan internasional dalam bidang ekonomi/moneter yang berdasarkan pada bargaining, negosiasi dan semangat bersaing akan diselenggarakan seperti Summit Tokyo dan sebagainya. Dalam hal ini model merkantilisme akan lebih menonjol dibandingkan dengan kedua model lainnya. Kepentingan nasional mendapat prioritas utama sedangkan hubungan internasional dan bisnis internasional dilihat sejauh mana bermanfaat untuk kepentingan nasional. Perdagangan bebas dan "fixed exchange rate" sudah tidak ada lagi. Kedua tonggak tersebut yang didasarkan pada "kerukunan" kekuatan industri Amerika, Eropa Barat dan Jepang sudah merupakan suatu titik yang tidak berarti dalam sejarah bisnis internasional. Kepentingan nasional atau blok sudah menggantikan "free trade" dan membentuk OMAS (Organized Marketing Agreements), "Organized Free Trade" yang merupakan istilah lain untuk proteksionisme. Meskipun secara resmi hampir semua pimpinan negara industri khususnya para ekonom (Amerika, Jepang, Eropa Barat) tidak menyetujui untuk kembali ke dalam era proteksionisme, tetapi kepentingan

nasional (pengangguran, inflasi, defisit neraca pembayaran dan sebagainya) telah mengharuskan mereka untuk menerima skema atau arrangements yang sudah diarahkan ke dalam bentuk-bentuk proteksionisme.¹ Dalam hal ini Jepang sudah sedikit banyak "dipaksa" oleh dunia internasional untuk mengganti strategi "export led economy" dengan "domestic demand led economy". Jepang sedang dalam proses mengubah struktur ekonominya ke arah "intensive knowledge industry" sehingga menciptakan dasar-dasar ke arah suatu "service economy". Sistem bargaining dan negosiasi antara kepemimpinan negara dan blok regional akan merupakan ciri penting di masa mendatang.

PERUBAHAN DUNIA INTERNASIONAL DAN HARI DEPAN MNC

Perubahan-perubahan dalam dunia internasional seperti adanya proliferasi dalam struktur kekuatan antara industrial powers (Amerika, Eropa Barat dan Jepang) akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap MNC/TNC.

Hood dan Young berpendapat bahwa aspek-aspek yang akan mempengaruhi masa depan MNC/TNC dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Usul-usul dan Tekanan-tekanan Mengenai "Tata Ekonomi Internasional Baru (New International Economic Order)"

Kedua penulis ini berpendapat bahwa walaupun usul-usul NIEO mempunyai akibat yang jauh, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan seluruhnya. Meskipun demikian "mood" Dunia Ketiga dapat dilihat sebagai suatu pertanda bahwa negara-

¹ Menurut keterangan para Guru-guru Besar di Amerika masih mengkomit diri kepada prinsip-prinsip "free trade".

negara Dunia Ketiga akan lebih banyak mengambil tindakan terhadap MNC/TNC yang bersifat sepihak (unilateral).

2. Hubungan Ekonomi yang Semakin Baik Antara Negara Sosialis/Komunis dengan Negara Barat

Semakin baiknya hubungan ekonomi antara negara-negara blok Timur dengan negara-negara blok Barat akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi MNC/TNC. Lima segi dan tiga segi kekuatan yang dimilikinya akan lebih banyak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertindak sebagai partner yang mempunyai pengalaman dan kekuatan. Dalam hal ini kita dapat melihat usaha-usaha MNC/TNC Barat dan Jepang untuk menggunakan kesempatan dengan dibukanya hubungan RRC dengan dunia luar. Bank-bank internasional secara teratur dan sistematis mulai memasuki pasar PRC dengan berbagai usul dan konsorsium.

3. Isyu-isyu dalam Bidang Perdagangan dan Moneter

Kekuatan yang menghendaki adanya berbagai bentuk proteksionisme tercermin dengan meningkatnya penghalang nontarif¹ yang pada masa kini merupakan salah satu ciri yang berpengaruh pada kegiatan MNC/TNC. Dianjurkan investasi yang bersifat "defensif" sehingga perdagangan di antara MNC akan mengalami kemunduran. Dewasa ini MNC Jepang dan MNC Barat seperti bank-bank internasional dan manufacturing sudah mulai memasuki investasi langsung di Amerika.

4. Perubahan dalam Distribusi Kekuasaan

Menurut kedua penulis ini, posisi kepemimpinan Amerika sebagai kekuatan ekonomi sedang menurun dalam dunia

¹ Walaupun MTN (Multilateral Trade Negotiations) dikenal sebagai Tokyo Round sudah disetujui oleh negara-negara industri (Amerika melihatnya sebagai usaha ke arah "freer and fairer trade") banyak negara-negara yang sedang berkembang belum seluruhnya dapat menyetujui MTN (Group 77).

internasional, meskipun dalam bidang militer mereka masih tergolong yang mempunyai kekuatan besar, hanya mungkin untuk beberapa sektor, Rusia telah melampaui kekuatan militer Amerika. Kekuatan ekonomi yang sedang menurun mempunyai pengaruh pada MNC Amerika, karena jumlah yang disalurkan dalam bentuk bantuan dan pengeluaran militer akan berkurang. Hal ini berarti bahwa MNC Amerika tidak mendapat bantuan yang berarti lagi dari bantuan dan pengeluaran untuk keperluan kemiliteran.

5. Kerja Sama Regional

Perluasan kerja sama EEC dan kemungkinan timbulnya kerja sama regional lainnya akan membuka kesempatan yang baik bagi MNC dan juga akan memberikan "bargaining power" yang lebih banyak kepada mereka yang menjadi anggota kerja sama regional tersebut. Kita melihat bahwa ASEAN telah berkembang menjadi suatu kesatuan, dan MNC/TNC melihat hal ini sebagai suatu market yang semakin luas. Sebagian dari MNC perbankan sudah lama beroperasi di negara-negara ASEAN, seperti Chartered Bank, FNCB, Bank of America dan sebagainya maka mereka sudah beroperasi secara ASEAN, sedangkan bank-bank ASEAN sendiri kecuali Bangkok Bank (cabang-cabangnya di Singapura dan Jakarta) belum beroperasi secara ASEAN.

6. Berkurangnya Sumber-sumber

Walaupun prediksi akan bertumbuhnya "kartel-kartel" produsen, tetapi sebagian besar belum terwujud, kecuali OPEC. Prospek akan berkurangnya sumber-sumber untuk jangka panjang akan memperkuat kedudukan negara-negara produsen dalam menghadapi MNC/TNC. Sikap Amerika/Jerman Barat tergolong "hard-liners" dalam hal peretujuan komoditi.

7. Apakah Pemerintahan Negara Akan Lebih Restriktif?

Peraturan-peraturan pada tingkat nasional dan mungkin

juga pada tingkat regional akan lebih restriktif terhadap kegiatan-kegiatan MNC, dan pengawasan-pengawasan akan lebih diperketat. Hal ini merupakan suatu tendensi yang dapat mempengaruhi kegairahan MNC/TNC untuk mengadakan investasi ke negara sedang berkembang. Pemimpin-pemimpin MNC membutuhkan lebih banyak fleksibilitas dalam menghadapi "mood" di negara-negara sedang berkembang. Pola-pola investasi pun sedang mengalami perubahan, lihat Korea Selatan dan sebagainya.

8. Timbulnya MNC di Dunia Ketiga

Untuk dapat menciptakan suatu "counter vailing power" atau mendapat inspirasi dari keberhasilan MNC Jepang dan lain-lain, maka banyak negara di Dunia Ketiga sudah mulai menciptakan MNC yang dapat digolongkan sebagai MNC Dunia Ketiga. Perkembangan ini dapat kita lihat di Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Malaysia, Thailand dan negara-negara Amerika Latin. Proses ini berkembang dengan cepat dan mereka akan mempunyai pengaruh dalam lapangan kerja MNC di Dunia Ketiga yang masih luas ini. East-West dalam bulan September 1979 menyelenggarakan seminar yang membahas mengenai aspek-aspek MNC Dunia Ketiga.

ASEAN DAN MULTINATIONAL CORPORATIONS

Pandangan yang dikemukakan di sini merupakan salah satu dari berbagai pandangan yang dikemukakan oleh para penulis dan analisis lainnya di negara-negara ASEAN. Pengaruh MNC/TNC terhadap negara-negara ASEAN mungkin berbeda-beda dalam intensitas dan fokus, sehingga sulit untuk mengatakan secara lebih terperinci mengenai pengaruhnya dalam bidang perekonomian atau bisnis ASEAN.

Pandangan ASEAN Mungkin Sesuai dengan Model Merkantilis

Dalam menghadapi MNC, negara-negara ASEAN mungkin sekali condong pada model merkantilis. Kepentingan nasional

mendapat prioritas utama. Hubungan luar negeri, diplomasi, investasi langsung, bantuan luar negeri dan kesempatan MNC/TNC beroperasi di negara-negara ASEAN adalah dalam rangka menunjang pola kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar dalam perumusan kebijaksanaan ekonomi negara-negara ASEAN. Dalam kenyataan perumusan kepentingan nasional sulit untuk diperinci atau dituangkan dalam program operasional yang konsisten.

MNC yang Beroperasi di Negara-negara ASEAN

Sejak ratusan tahun yang lalu MNC merupakan bagian dalam perekonomian negara-negara ASEAN. Dengan demikian MNC yang beroperasi di negara-negara ASEAN dapat digolongkan sebagai berikut: (i) MNC yang sudah beroperasi di negara-negara ASEAN sejak sebelum Perang Dunia II, yang berasal dari Inggris dan negara-negara Eropa Barat lainnya seperti Harrisons Crosfield, Guthrie, Inchcape, East-Asiatic, Cartino Carlo, Unilever, BAT, Philips, Nestle, Mitsui, Mitsubishi dan sebagainya yang sampai saat ini masih beroperasi sebagai MNC dengan kantor pusat di luar negara-negara ASEAN, (ii) perusahaan MNC yang sudah dibentuk dan beroperasi di negara-negara ASEAN sejak sebelum Perang Dunia II tetapi dewasa ini sudah: (a) diambil alih oleh Pemerintah seperti halnya dengan MNC Belanda; Borsumij, Geo Wehry, bank-bank dan sebagainya, (b) MNC yang dibeli melalui akuisisi saham-saham di bursa seperti Sime Darby dan usaha-usaha membeli saham mayoritas di Guthrie (oleh Sime Darby akan tetapi belum berhasil), (iii) MNC yang berasal dari Eropa Barat, Amerika dan Jepang yang muncul setelah Perang Dunia II setelah stabilitas politik tampak di negara-negara ASEAN, (iv) MNC yang menurut ukuran ASEAN dibentuk setelah Perang Dunia II sebagai: (a) hasil pengambilalihan usaha atau MNC asing seperti Perusahaan-perusahaan Negara yang beroperasi di Indonesia (Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Niaga-niaga, PNP-estates dan sebagainya), (b) MNC

yang dibentuk oleh Pemerintah seperti: Pernas (Malaysia), Pertamina, Pupuk Sriwijaya (Indonesia), Temasek Holdings (Singapura - yang memiliki SIA, Development Bank of Singapore dan sebagainya), (c) perkembangan usaha swasta sendiri seperti: Kuok Brothers (Malaysia), United Overseas Bank Group (Singapore), Bangkok Bank Group dan lain-lain (Thailand), Salim Group, Astra Group, Jaya Group (Indonesia, Desini Group, Soriano Group, Ayala Group, Gokongwei Group (Philippines).

MNC yang Berasal dari Negara Barat dan Jepang

Apabila kita melihat kegiatan MNC Barat dan Jepang, maka tampak bahwa MNC Jepang mendominasi sektor manufacturing di negara-negara ASEAN, sedangkan MNC yang berasal dari Amerika cukup dominan dalam "extractive industries" khususnya minyak. Dalam bidang perbankan, hampir semua bank internasional sudah mempunyai perwakilan (cabang, representatif, joint merchant bank dan sebagainya) di negara-negara ASEAN, khususnya di pusat keuangan Singapura. Dapat dikatakan bahwa bank-bank internasional Jepang, Eropa Barat (Jerman Barat, Inggris, Perancis dan sebagainya) dan Amerika Serikat sudah banyak yang beroperasi di negara-negara ASEAN. Dalam bidang manufacturing dapat dikatakan bahwa MNC Jepang yang memiliki lima segi kekuatan mendominasi berbagai kegiatan dalam bidang industri mulai dari industri tekstil sampai industri otomotif. Dominasi mereka antara lain didasarkan pada prinsip "mencapai share market yang tertinggi" dan untuk ini MNC Jepang bukan hanya bertindak sebagai pemrakarsa joint venture, tetapi juga bertindak sebagai "merchant and commercial bank". Berbagai bentuk kredit seperti kredit dagang, peralatan, bahan mentah dan sebagainya dapat mereka berikan, sehingga mereka dapat "out-compete" MNC yang berasal dari negara Barat dan Amerika. Apabila kita melihat jumlah investasi langsung (dalam

bentuk modal equity yang ditanam dalam berbagai joint venture) dibandingkan dengan berbagai macam kredit yang mereka berikan sebagai "service" untuk mempertahankan share terbesar dalam market, maka jumlah investasi langsung apabila dikatakan \$ 100 juta untuk tiap MNC Jepang maka kredit fasilitas yang disalurkan mungkin mencapai sepuluh kali lebih banyak (sebagian besar kredit fasilitas ini bersifat jangka pendek dan menengah). Pola tersebut berlaku di hampir semua negara ASEAN yang terdapat MNC Jepang. Melalui PM Lee Kuan Yew, Singapura mengumumkan jumlah perbandingan antara MNC yang berasal dari negara Barat dengan Jepang yang melakukan investasi di Singapura. Tabel terlampir menggambarkan perbandingan tersebut, dari tabel ini kita melihat bahwa value added¹ per pekerja dari MNC Jepang menunjukkan angka yang terendah dibandingkan dengan Belanda dan Inggris. Kesimpulan yang diambil oleh Perdana Menteri Singapura ini adalah bahwa perusahaan-perusahaan Jepang tidak mempergunakan mesin-mesin tetapi lebih banyak menggunakan "manual workers" (dewasa ini Singapura mengalami kekurangan manual workers).

BEBERAPA AKIBAT YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Dominasi MNC-MNC dalam Sektor-sektor Manufacturing

Di beberapa negara ASEAN yang kami ketahui seperti Indonesia, Thailand dan mungkin juga Pilipina serta sebagian kecil di Singapura (Amerika dan Inggris) dan Malaysia (Inggris), banyak didominasi oleh MNC Jepang terutama dalam

¹ Penjelasan mengenai *value added*. "This is the contribution made by a firm, involved with others in production of a good or service, to the value (monetary) of that good or service. That is the cost of materials, or the cost of the particular finished good as purchased from another firm, is deducted from the market price of the good when it leaves a given enterprise. The enterprise "adds value" to the ultimate product.

bidang manufacturing. Sarana-sarana dalam bidang pembiayaan, khususnya pasar modal terbatas jumlahnya sehingga hampir setiap joint venture dengan MNC Jepang atau asing lainnya pemilikan mayoritasnya berada dalam tangan pihak asing. Meskipun terdapat peraturan bahwa dalam jangka waktu sepuluh tahun pemilikan minimum 51% harus berada dalam tangan pemilik nasional, tetapi dalam praktek karena kelangkaan pasar modal mengakibatkan kedudukan mayoritas sulit untuk dicapai, kecuali beberapa pengusaha nasional yang kuat. Keadaan ini khususnya berlaku untuk joint venture misalnya di Indonesia dan mungkin juga di Pilipina. Untuk mengatasi dominasi mayoritas oleh pihak asing ini harus diciptakan lembaga-lembaga atau mekanisme yang memungkinkan negara-negara tersebut untuk mencapai pemilikan mayoritas. Contoh yang terbaik mungkin dapat kita ambil dari usaha-usaha di Korea Selatan. Bank-bank devisa Korea Selatan serta proyek-proyek yang telah diseleksi dengan cermat, diperkenankan untuk menarik modal dari pasar uang dan modal internasional melalui konsorsia atau pengeluaran "bonds" dan lain-lain.

Cara lain yang sedang dilakukan adalah mengusahakan agar perusahaan joint venture secara berangsur-angsur menjual sebagian dari saham-sahamnya melalui bursa saham-saham. Dewasa ini di Indonesia sudah dilakukan oleh beberapa joint venture seperti PT Semen Cibinong, dan segera menyusul BAT, Centex, Tifico dan sebagainya. Yang dijual di bursa masih merupakan suatu persentase kecil dari jumlah keseluruhan.

2. Mempertinggi Dependensi atautkah Interdependensi?

Semakin banyak MNC yang beroperasi di negara-negara ASEAN, maka secara logis kiblat dan arah dari usaha-usahanya ditujukan ke kantor pusatnya di Tokyo, Eropa Barat dan Amerika. Khususnya MNC Jepang banyak sekali beroperasi di negara-negara ASEAN dan memperlihatkan kecenderungan meningkatnya volume perdagangan impor/ekspor antara

negara-negara ASEAN dan Jepang. Bahan-bahan mentah seperti kayu, minyak, karet, bauksit, tembaga dan sebagainya diarahkan untuk mensuplai Jepang, sedangkan kebutuhan-kebutuhan bahan mentah untuk industri manufacturing lebih banyak didatangkan dari Jepang. Apakah hal ini merupakan suatu dependensi atautkah suatu interdependensi? Apakah kita menggunakan perumusan dependensi atau interdependensi seperti telah dikemukakan di atas, maka kenyataan ini lebih cenderung memperlihatkan situasi dependensi. Apabila di Jepang terdapat penurunan jumlah pembuatan rumah, maka ekspor kayu dari Indonesia pun akan mengalami kelesuan sehingga bagi Indonesia hal ini merupakan suatu kesulitan baru. Demikian pula akibat "resesi" di Jepang pada tahun 1973 sangat dirasakan oleh sektor produksi bahan-bahan mentah di Indonesia demikian juga dirasakan oleh sektor pengangkutan laut.

3. Konsumen dan Assortment

Dengan lebih banyak assortment yang merupakan hasil produksi MNC maka konsumen mempunyai lebih banyak kesempatan untuk memilih. Pasar yang penuh dengan assortment akan lebih kompetitif dengan demikian dapat mempertinggi servis dan memperkuat kedudukan konsumen di pasar tersebut. Variasi assortment dalam bentuk, warna, tipe dan sebagainya baik untuk barang konsumsi maupun untuk barang kebutuhan rumah tangga menguntungkan konsumen golongan menengah. Transistor, radio, sepeda motor dan lain-lain sudah memasuki desa-desa dan hal ini sangat membantu memperlan-car komunikasi dan pengangkutan.

4. Menjadi Lebih Kompetitif

Dalam bidang pemberian jasa seperti asuransi, perbankan, pengangkutan dan sebagainya tampaknya usaha nasional memberikan pelayanan yang lebih baik daripada MNC. Dalam

bidang manufacturing memang MNC lebih menonjol, misalnya industri menengah/kecil dalam bidang minuman, tekstil dan sebagainya sangat terpukul dengan masuknya MNC ke dalam bidang-bidang tersebut. Walaupun demikian kita juga melihat ada beberapa usaha nasional yang sanggup untuk menghadapinya, seperti: (i) teh botol buatan pabrik nasional di Indonesia yang berhasil menghadapi persaingan Coca Cola, (ii) PT Distinct Indocement yang berhasil menyaingi perusahaan semen MNC Kaisar Industries, (iii) Singapore Airlines yang dapat menghadapi persaingan perusahaan penerbangan lainnya, (iv) UOB di Singapura yang dapat menghadapi persaingan bank-bank asing, sama halnya dengan Bangkok Bank dari Thailand dan seterusnya. Apabila dilakukan survei secara lebih mendalam maka akan diperoleh data mengenai perusahaan-perusahaan nasional yang berhasil menghadapi persaingan MNC Jepang atau negara-negara Barat lainnya.

5. Membangun Semangat Inovasi

Keberhasilan MNC yang tampak dalam perpaduan manajemen-teknologi-modal-network-dukungan Pemerintah telah memberikan berbagai inspirasi pada para wiraswasta dan wiraswasta-Pemerintah untuk mendirikan usaha-usaha sejenis (MNC third world) yang dapat memadukan kelima segi kekuatan tersebut. Di sini akan dikemukakan beberapa contoh (untuk pembahasan lebih lengkap lihat karangan yang diajukan dalam seminar East-West Centre mengenai Third World MNC: (a) Temasek Holdings: Singapura telah berhasil memadukan kekuatan-kekuatan tersebut dan membina usaha-usaha Pemerintah seperti SIA, Development Bank of Singapore, sedangkan dari usaha swasta meliputi United Overseas Bank Group, OCBC Group, Union Overseas Bank Group dan sebagainya; (b) Pernas Group yang berusaha untuk membantu mewujudkan penguasaan dari salah satu MNC/Internasional seperti Sime Darby, Bumi Putra Berhad Bank, United Malayan Bankin Group serta usaha swasta seperti Kuok Group dan sebagainya (Kuok

dianggap sebagai the sugar king of Asia); (c) Bangkok Bank Group dan group perbankan lainnya di Thailand; (d) Ayala Group, Soriano Group, Desini Group dan lain-lain di Pilipina dan telah berkembang, antara lain berdasarkan inspirasi dari keberhasilan konsep "general trading firms" di Jepang dan mungkin juga di Korea Selatan; (e) Astra Group, Salim Group, Bouraq Group, Soedarpo Group, Jaya Group dan lain-lain di Indonesia termasuk usaha Pemerintah Indonesia lainnya seperti Pupuk Sriwijaya, Semen Gresik, Garuda Indonesian Airways, PT Timah dan lain-lain.

Dapat dikatakan bahwa di antara negara-negara ASEAN atau di antara usaha-usaha tersebut di atas sudah terdapat suatu bentuk "cross investment", misalnya: Bangkok Bank Group merupakan salah satu bank untuk Distinct Indocement, sedangkan Kuok Group dari Malaysia membantu keberhasilan pembuatan pabrik terigu Bogasari dan salah satu pabrik gula di Lampung.

6. Ekspor yang Sebagian Besar Menggunakan Jasa-jasa MNC Jepang/Barat

Ekspor bahan-bahan mentah seperti kayu dan plywood sebagian besar masih menggunakan jasa MNC Jepang, walaupun usaha nasional sudah berhasil memasuki pasar Eropa dan Amerika secara langsung. Peranan MNC Jepang dalam bahan-bahan mentah masih terasa cukup besar terutama dalam ekspor hasil-hasil industri. Hasil-hasil industri yang diekspor dari Singapura sebagian besar masih menggunakan saluran-saluran MNC Jepang, demikian juga halnya dengan hasil industri dari Indonesia, terutama apabila yang diekspor itu adalah hasil dari usaha joint venture. Hal ini tidak mengherankan, karena seperti telah dikemukakan di atas MNC Jepang mempunyai network international yang demikian mendalamnya sehingga MNC Barat pun melihatnya sebagai saingan berat. Pengeksporan hasil-hasil industri harus mempunyai keahlian

tersendiri yang berbeda dengan ekspor bahan mentah. Suatu assortment dari barang-barang dan jasa selalu harus menyertai pengeksportan hasil-hasil industri. Yang membuat para eksportir hasil industri memperoleh keberhasilan adalah tersedianya suatu assortment komoditi hasil-hasil industri dan kesediaan membantu dengan berbagai jenis pemberian servis seperti pembiayaan, kredit, jasa sesudah penjualan, informasi dan lain-lain dalam lingkungan organisasinya

7. Perlu Adanya "General Trading Firms"

Awal pemasaran hasil-hasil industri ke pasar internasional akan mendorong negara-negara ASEAN untuk lebih memperhatikan konsep "general trading firms" dan mekanisme operasionalnya. Yang telah berhasil menerapkan konsep tersebut di atas adalah Korea Selatan dengan adanya MNC seperti Hyundai, Lucky Group dan sebagainya. Konsep "general trading firms" bukanlah suatu konsep yang baru bagi Indonesia. Sebelum Perang Dunia II, sepuluh perusahaan besar Belanda seperti Borsumij, Internatio dan sebagainya termasuk usaha swasta seperti Central Trading Corporation, Kian Gwan Concern dan bentuk-bentuk lain yang lebih sederhana telah mulai melaksanakan konsep ini, terutama apabila konsep ini dapat dilaksanakan pada tingkat ASEAN. Thailand sudah melaksanakan konsep general trading firms dengan pembentukan "Thailand Sogo Shosha".

Dewasa ini yang dapat digolongkan sebagai ASEAN general trading firms adalah Sime Darby yang dikuasai oleh para pemegang saham Malaysia, tetapi dalam Dewan Komisarisnya terdapat perwakilan dari Pilipina dan Singapura, hanya Indonesia dan Thailand yang belum mempunyai wakilnya.

8. Perlu Adanya Negosiasi Bukan Konfrontasi

MNC berada di tengah-tengah kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Sikap yang diambil oleh para pengambil

keputusan di negara-negara ASEAN adalah menyelaraskan kemampuan, kapabilitas dan kepentingan nasional untuk mencari suatu tingkat pengertian dan "working arrangements" yang bermanfaat untuk perkembangan perekonomian nasional. Ketegangan, tantangan, frustrasi dan sebagainya akan membawa negara-negara ini ke meja negosiasi atau perundingan. Hal ini akan dilakukan oleh negara-negara ASEAN, dalam hal ini hanya MNC yang memperlihatkan kearifannya dan melihat jauh ke depan, sehingga fleksibilitas, ketekunan dan perhatian terhadap kepentingan nasional masing-masing negara ASEAN akan berperan dalam perkembangan ekonomi ASEAN. Di lain pihak Pemerintah-pemerintah negara ASEAN yang menjadi tuan rumah MNC-MNC harus memberikan ketentuan-ketentuan yang lebih konsisten sehingga dapat mempertinggi kredibilitas di mata dunia MNC internasional.

Menurut pandangan penulis masa "konfrontasi" MNC tampaknya sudah tertinggal jauh di belakang, karena kini sudah mencapai tingkat yang lebih dewasa. Masa yang akan datang adalah masa "negotiated settlement". Dunia internasional akan didasarkan pada pengertian tersebut di atas, dan secara tidak langsung pada tingkat MNC dan nation state, sehingga kemungkinan besar setiap ketidakserasian akan dibawa ke meja perundingan atau negosiasi sehingga dapat dicapai suatu konsensus.

9. **Bagaimana MNC/TNC Melihat ASEAN?**

Perkembangan ASEAN sebagai suatu kerja sama regional mendapat perhatian besar karena dapat memperluas pasar dan ruang lingkup operasi (scope of operation) dari usaha mereka di ASEAN. Sudah ada beberapa MNC yang beroperasi di negara-negara ASEAN, seperti bank-bank internasional: Chase Manhattan Bank, City Bank, Chartered Bank, Hongkong Shanghai Bank, Bank of America, serta usaha-usaha lain seperti Unilever, BAT, Philips dan beberapa MNC yang sudah berdomisili dan menjadi warga ASEAN seperti Sime Darby, Bangkok Bank, Garuda, SIA, Thai Airways, MAS dan sebagainya.

Table 1

STOCKS OF THREE GENERAL TRADING COMPANIES ANALYZED BY SHAREHOLDERS, MARCH 31, 1975

	Government and public institutions	Financial institutions	Security companies	Other corporations	Foreign corporations	Private individuals and others	Total
<i>Mitsubishi Coporation</i>							
No. of shareholders	1	72	28	549	83	33,675	34,408
Percent share of total stocks issued	0.0	48.47	0.61	36.02	1.08	13.82	100.0
<i>Marubeni Corporation</i>							
No. of shareholders	1	64	46	477	27	17,245	17,860
Percent share of total stocks issued	0.03	61.56	0.52	29.47	0.21	8.21	100.0
<i>Toyomenka Kaisha</i>							
No. of shareholders	0	54	19	448	14	4,473	5,003
Percent share of total stocks issued	0.0	47.62	0.87	45.74	0.04	5.73	100.0

Source : Financial Statements of the Firms, March 31, 1975; From The Young, *op. cit.*

Table 2

STOCKS OF THREE GENERAL TRADING COMPANIES ANALYZED BY NUMBER OF SHARES, MARCH 31, 1975									
	1,000,000 and over	500,000 and over	100,000 and over	50,000 and over	10,000 and over	5,000 and over	500 and over	Less than 500	Total
Mitsubishi Corporation									
No. of shareholders	84	50	168	130	1,198	2,792	24,635	5,351	84,408
Percent share of total shareholders	0.24	0.15	0.49	0.38	3.48	8.11	71.60	15.55	100.0
Percent share of total stocks issued	76.89	4.86	4.84	1.20	3.15	2.55	6.36	0.15	100.0
Marubeni Corporation									
No. of shareholders	78	52	122	92	803	1,693	12,093	2,927	17,860
Percent share of total shareholders	0.43	0.29	0.68	0.52	4.50	9.48	67.71	16.39	100.0
Percent share of total stocks issued	82.33	5.46	4.08	0.95	2.18	1.67	3.25	0.08	100.0
Toyomenka Kaisha									
No. of shareholders	43	22	79	28	314	417	2,676	1,424	5,003
Percent share of total shareholders	0.86	0.44	1.58	0.56	6.28	8.33	53.49	28.46	100.0
Percent share of total stocks issued	77.69	6.88	7.90	0.94	3.00	1.24	2.18	0.08	100.0

Source : Financial Statements of the Firms, March 31, 1975; From the Young *op. cit.*

Table 3

MAJOR STATISTICS OF MANUFACTURING ESTABLISHMENTS WITH
FOREIGN INVESTMENTS IN SINGAPORE AS AT END 1978*

	U.S.	Nether- lands	Japan	U.K.	F.R. Germany	Total Manufact- uring
Value Added/ Worker (\$)	27,279	61,913	15,533	51,922	16,724	21,406** (Industry Average)
Output (\$ million)	5,116	3,660	2,545	4,675	292	19,577**
% of total manufacturing output	26.1%	18.7%	13.0%	23.9%	1.5%	100%
Foreign Investment (\$ million)	1,600	904	801	791	144	5,242
% of total foreign investment	30.5%	17.2%	15.3%	15.1%	2.7%	100%
Employment	43,367	8,449	41,510	17,551	9,184	236,693**
% of total manufacturing employment	18.3%	3.6%	17.5%	7.4%	3.9%	100%

* EDB Annual Survey of Manufacturing Activity 1978

** Figures Include Local Investments

Source : *Business Times*, 16-10-1979

Table 4

WAGE COMPARISON OF ASIAN COUNTRIES
(Mean Monthly Salary in US\$)

Country	Mechanical Engineer	Skilled Worker
Japan	1,244 (100)	1,161 (100)
Singapore	710 (57)	206 (18)
Taiwan	407 (33)	167 (14)
South Korea	507 (41)	318 (27)
Hongkong	627 (50)	255 (22)
Thailand	460 (37)	86 (7)
Indonesia	786 (63)	137 (12)
Malaysia	677 (54)	181 (16)
Philippines	191 (15)	81 (7)

Source : *Business Asia*, May 19, 1978

Note : Index in brackets with Japan = 100

Source : *Business Times*, 16-10-1979

KERAWANAN SUPLAI MINYAK NEGARA-NEGARA BARAT*

Negara-negara industri Barat menyadari, khususnya sejak embargo minyak Arab pada tahun 1973, bahwa minyak adalah bahan bakar yang sensitif dari segi politik. Suatu analisa kerawanan (vulnerability) Barat harus mencakup hal-hal berikut: suatu perkiraan betapa vital minyak itu untuk dunia Barat dan proyeksi permintaan selama beberapa dasawarsa mendatang ini; kepastian suplai dan kemungkinan untuk mendapatkannya dan biaya pengangkutan; pengembangan sumber-sumber bahan bakar lain dan kesediaan Barat untuk menekan konsumsi minyak. Hambatan-hambatan suplai minyak dapat bersifat ekonomis seperti naiknya harga yang bisa menimbulkan inflasi dan kesulitan-kesulitan pembayaran; bersifat politik seperti penghentian suplai minyak yang terjadi dalam embargo tahun 1973; atau bersifat fisik seperti usaha pihak ketiga untuk mencegah ekspor minyak Timur Tengah mencapai Barat.

KEBUTUHAN MINYAK

Negara-negara maju telah terbiasa selama bertahun-tahun untuk menggunakan minyak murah dan negara-negara berkembang rupanya cenderung untuk mengikuti mereka. Pada tingkat konsumsi sekarang ini cadangan minyak dunia akan habis dalam waktu 30 tahun. Laju pengurasan akan lebih rendah jika harganya menjadi terlalu mahal sebagai akibat tindakan OPEC atau peningkatan pajak dalam negeri; jika lebih banyak minyak diperoleh dari batubara, konversi biomass atau lain-lain sumber; jika ditingkatkan penggalian lain-lain sumber energi seperti energi nuklir dan energi matahari; atau jika terjadi depresi ekonomi umum yang akan menekan konsumsi minyak.

* Untuk sebagian diambil dari Audrey Parry, *The Growing Vulnerability of Oil Supplies* (London: Foreign Affairs Research Institute, 18/1978, oleh Kirdi DIPOYUDO

Soal ini adalah mendesak karena kebijaksanaan energi memerlukan semakin banyak waktu untuk pelaksanaannya seperti halnya dengan energi nuklir yang penuh dengan prosedur pengadilan dan pengaturan yang berlarut-larut dan keberatan-keberatan lingkungan. Konsumsi minyak juga tidak dikurangi secara yang memadai biarpun dianjurkan terus menerus. Pada pertemuan Perhimpunan Energi Internasional (IEA) Oktober 1977 para Menteri memutuskan bahwa para anggota harus menekan impor minyak mereka sampai 26 juta barrel sehari. Akan tetapi target ini dalam kenyataan tidak dicapai. Dr. Ulf Lantze, Direktur Eksekutif IEA, memperingatkan: "Antara sekarang dan 1985 kita mengharapkan bahwa konsumsi minyak dunia nonkomunis akan naik rata-rata 3,5% setahun, sekitar separuh laju dasawarsa 1960-an. Sampai 1980 permintaan akan minyak OPEC, yang kini adalah sedikit di atas 30 juta barrel sehari, akan relatif tetap sebagai akibat munculnya suplai-suplai baru. Setelah suplai non-OPEC mencapai puncaknya, permintaan akan minyak OPEC akan naik lagi sehingga keadaan pasar pada tahun 1983 akan ketat lagi sesuai dengan semakin besarnya selisih antara permintaan dan suplai yang tersedia sesudah itu.¹ Lagi pula terdapat calon-calon pembeli lain. Kenyataannya negara-negara blok Timur telah mendekati OPEC.²

Eropa dan Jepang jauh tidak seboros Amerika Serikat. Menurut perkiraan impor minyak negara terakhir ini akan meningkat menjadi 11 juta barrel sehari pada tahun 1985, dan tidak akan menurun menjadi 7 juta barrel sehari seperti diserukan oleh Rencana Energi Nasionalnya. Pada tabel konsumsi IEA Amerika Serikat secara konstan tercatat sebagai pelanggar. Akan tetapi bahkan Inggris yang beruntung dengan minyak Laut Utara masih harus mengimpor banyak minyak dari Timur Tengah, karena Laut Utara menghasilkan minyak ringan

1 Kuliah di Tokyo, 10 April 1978

2 Wawancara BBC II, 14 Mei 1978

(light crude) yang tidak begitu cocok untuk banyak kilang Inggris kecuali jika dicampur dengan minyak yang lebih berat dari Timur Tengah.¹

PERSAINGAN PERMINTAAN BLOK TIMUR

CIA Amerika Serikat membuat suatu perkiraan yang menakutkan, bahwa produksi minyak Uni Soviet bisa jauh lebih rendah dari pada kebutuhannya dan kebutuhan sekutu-sekutunya pada tahun 1983 dan bahwa dunia komunis akan terpaksa bersaing dengan dunia Barat untuk mengimpor minyak.² Perkiraan itu disanggah oleh Uni Soviet, tetapi kesaksian Sheikh Yamani rupanya mendukungnya. *Oil and Gas Journal* Amerika Serikat menegaskan : "Masuknya Uni Soviet dalam pasaran minyak dunia sebagai pengimpor minyak pada dasawarsa 1980-an dapat lebih mempersulit ekuasi suplai-permintaan. Uni Soviet dapat menjadi saingan berat jika membutuhkan banyak impor. Sebagian akibat kekurangan kronisnya akan mata uang keras dan tidak menariknya rubel untuk para pengeksport, Pemerintah Soviet mungkin akan menyimpulkan, bahwa dia tidak mempunyai pilihan selain menggunakan segala sarana yang tersedia baginya kecuali perang untuk mendapatkan kebutuhannya. Orang dapat memahami bahwa pemerasan (blackmail) terhadap negara-negara penghasil minyak akan selaras dengan pola Soviet Khususnya mungkin akan tampak sebagai suatu keharusan bagi Uni Soviet untuk mendapatkan suplai yang terjamin dari satu atau lebih banyak pengeksport lewat hubungan-hubungan politik dan keamanan. Reperkusi-reperkusi internasional usaha serupa itu yang lebih luas akan sangat besar."³ Dengan perkataan lain, campur tangan Soviet di Timur

1 Lihat Lawrence Freedman, "The British Oil: The Myth of Independence", *The World Today*, Agustus 1978

2 Lihat Bridget Gail, "The West's Jugular Vein: Arab Oil", *Armed Forces Journal*, Agustus 1978

3 *Oil and Gas Journal*, Mei 1978

Tengah bisa menjadi suatu faktor meningkatnya kebutuhan minyak maupun pemotongan suplai minyak Barat yang bersifat strategis.

TANGGAPAN KOLEKTIF BARAT

Badan Energi Internasional (IEA) dibentuk pada tahun 1974 di bawah naungan OECD dan kini mempunyai 19 anggota, yang bersama-sama memakai 50% kebutuhan energi dunia. Badan ini menetapkan kerjasama jangka panjang dalam politik energi termasuk sumber-sumber energi lain, tujuan "menghemat energi", dan suatu rencana untuk membagi suplai minyak dalam keadaan darurat. Dia juga menetapkan kerjasama perusahaan-perusahaan minyak. Menurut pasal 11 "Bukanlah suatu sasaran dalam keadaan darurat meningkatkan bagian suplai minyak dunia yang dimiliki kelompok dalam keadaan pasaran normal. Pola-pola perdagangan minyak historis sejauh masuk akal harus dipertahankan."¹ Ketentuan ini mendapat kecaman-kecaman. IEA tidak mempunyai kekuatan politik tetapi efektif dalam program-program riset dan penerangan. Demikianpun latihan-latihan simulasi (alokasi minyak dalam waktu krisis) rupanya efektif. Kini dilakukan pemeriksaan tahunan terhadap program-program energi anggota-anggotanya, yang dinilai dengan Program Ketergantungan 12 pasal yang dimaksud untuk menekan impor minyak.² Para anggota mewajibkan diri untuk membangun persediaan sebanyak 90 hari impor dan target ini dicapai.

KEMUNGKINAN EMBARGO

Peribahasa bahwa mereka yang tidak mau belajar dari sejarah harus menderita lagi, tidak berlaku bagi tanggapan atas

1 *Agreement on an International Energy Programme*, Cmd Paper 5826

2 Lihat Louis Turner dan Audrey Parry, "The Next Steps in Energy Co-operation", *The World Today*, Maret 1978

embargo suplai minyak tahun 1973 yang dipaksakan atas Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa oleh OPEC atas desakan negara-negara Arab. Satu hasil ialah dibentuknya IEA. Disadari secara umum bahwa era suplai minyak murah yang tak terbatas telah lampau. Kejutan itu untuk sebagian disebabkan oleh identitas mereka yang mengenakan embargo. Sejauh itu embargo dilakukan oleh negara-negara maju, tidak oleh negara-negara berkembang. Dalam kenyataan akibat-akibat embargo terhadap beberapa negara tidaklah seberat naiknya harga minyak empat kali lipat pada tahun 1973-1974. Eropa tidak menderita kekurangan minyak biarpun untuk sementara waktu diadakan penjatahan darurat, dan perusahaan-perusahaan minyak dengan baik melakukan penjatahan dan pembagian minyak. Hal ini diakui oleh Komite-komite Kongres Amerika Serikat dan Masyarakat Ekonomi Eropa.¹

Pertanyaan apakah mungkin diadakan embargo lagi dijawab oleh ahli energi Mason Willrich sebagai berikut: "Kemungkinan tidak besar semua anggota kartel menyetujui embargo terhadap suatu negara pengimpor tertentu. Risiko pokok ialah embargo oleh anggota-anggota Arab OPEC dan risiko ini semata-mata tetapi erat berkaitan dengan sengketa Arab-Israel. Bahkan dalam hal ini tiada sepakat kata di antara penghasil-penghasil Arab. Irak dan Libia tidak setuju dengan embargo sesudah perang Oktober 1973."² Sesudah tahun 1973 OPEC menerima negara-negara yang tidak langsung berkepentingan dengan sengketa Timur Tengah seperti Nigeria sebagai anggota. Nigeria berulang kali mengeluarkan ancaman akan menghentikan pengiriman minyak ke Barat sebagai usaha untuk menghentikan atau mengurangi investasi Barat di Afrika Selatan, tetapi belum lama berselang Menlunya berkata: "Sekali minyak Nigeria diangkut dari pantai kami tiada pengawasan atas

1 Lihat Frank R. Wynant, *The U.S., OPEC and Multinational Oil* (Lexington Books, 1977)

2 Mason Willrich, *Energy and World Politics* (Free Press, 1975)

tujuan terakhirnya.”¹ Nigeria menjadi penasaran dengan pengumuman bahwa Inggris melanggar embargo terhadap Rhodesia, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh anggaran penghematannya dan usahanya untuk mencari dana di luar negeri. Kemungkinan nasionalisasi adalah lebih besar daripada embargo.

KEDUDUKAN ARAB SAUDI

Bahwa kedudukan Arab Saudi menentukan adalah jelas. Negara ini mempunyai seperempat cadangan minyak dunia yang diketahui dan merupakan pengeksport minyak terbesar di dunia. Sebagai akibatnya dia bisa bertindak sebagai penghasil bandul (swing) OPEC dengan mengambil sebagian beban untuk menyesuaikan suplai OPEC dengan permintaan, lagi pula menjamin kohesi OPEC dengan mengurangi produksinya sendiri untuk menanggapi menurunnya permintaan. Karena penduduknya sedikit, hanya sekitar 6 juta orang, dia hanya bisa menyerap bagian tertentu dari pendapatannya dan tidak perlu meningkatkan pendapatannya. Arab Saudi kerap kali menegaskan bahwa dari segi keuangan adalah lebih baik baginya untuk menyimpan minyak di bumi dan menantikan naiknya nilainya. Demi kepentingannya sendiri dia sejauh ini bertindak sebagai sahabat baik negara-negara Barat dengan menekan harga minyak OPEC; bertindak sebagai bankir negara-negara Arab moderat seperti Mesir; mempertahankan produksi yang diperlukan dan mendukung dollar Amerika Serikat terhadap tekanan-tekanan untuk beralih ke suatu paket mata-mata uang. Sebagai imbalan, Arab Saudi minta suplai senjata yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasionalnya, pengurangan konsumsi minyak Barat, suatu kemungkinan untuk bersuara di organisasi-organisasi internasional yang penting, dan kesempatan untuk menanamkan modalnya di negara-negara industri Barat. Beberapa permintaannya itu telah dipenuhi. Dia mendapatkan 60 pesawat F-15

1 Wawancara BBC II, 7 Juni 1978

Amerika Serikat dalam suatu paket persetujuan yang meliputi penjualan pesawat-pesawat tempur kepada Israel dan Mesir.¹ Dia juga mendapat satu kursi pada dewan eksekutif IMF, yang berarti gengsi tetapi juga diinginkan.

Permintaan terakhir adalah lebih sulit. Sheikh Yamani berkata: "Atau kami mengurangi produksi minyak untuk tidak menumpuk cadangan valuta asing atau anda menolong kami menanamkan modal kami di luar negeri dengan dividen yang wajar dan dengan keamanan serta akses ke pasaran kami tidak akan menguras cadangan minyak kami untuk anda kecuali jika kami mendapat penghargaan dan rangsangan untuk berbuat demikian."² Di lain tempat dia mengungkapkan suatu kekhawatiran bahwa pasar-pasar uang tidak dapat menyerap kelebihan yang besar dan menunjukkan kesadaran bahwa Jerman Barat dan Jepang tidak akan menyambut dengan gembira peralihan ke DM atau Yen sebagai satuan mata uang bagi penjualan minyak.³ Prospek menanamkan modal di perusahaan-perusahaan Barat adalah sulit biarpun masalah pemutaran kembali (recycling) petrodollar ternyata tidak membuat pusing negara-negara Barat seperti ditakutkan sebelumnya. Kuwait berhasil membeli 15% saham Daimler Benz, Iran 25% saham Krupps dan Arab Saudi tanah dan milik di Inggris. Tetapi semua negara industri Barat mempunyai kekuatan cadangan untuk mencegah orang asing mendapatkan terlalu banyak saham dalam perusahaan-perusahaan mereka yang penting. Lagi pula tidak semua orang Saudi mendukung politik Yamani dalam hal itu.

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN STRATEGIS

Timur Tengah masih merupakan titik bakar yang paling berbahaya di dunia. Kegembiraan yang timbul sehubungan

1 Lihat karangan "F-15 Fight: Who Won What", *Time*, 29 Mei 1978; dan "The Desert Superstate", *ibid*.

2 *Petroleum Economist*, Mei 1978

3 Wawancara BBC II, 14 Mei 1978

dengan tercapainya persetujuan-persetujuan Camp David segera lenyap. Persetujuan-persetujuan itu rupanya tidak akan lebih daripada persetujuan bilateral antara Mesir dan Israel karena tidak hanya ditolak oleh negara-negara Arab yang berhaluan keras tetapi juga oleh Arab Saudi dan Yordania. Arab Saudi menolaknya karena tidak dapat membiarkan kedaulatan atas Yerusalem di tangan Israel. Dia adalah penjaga dan pelindung tempat-tempat suci Islam, termasuk Yerusalem. Dengan demikian dia tidak dapat bergeser jauh dari posisinya itu tanpa kehilangan nama baiknya di dunia Arab dan Islam. Akan tetapi dia menyatakan kekhawatirannya dengan kehadiran pasukan-pasukan Kuba di Tanduk Afrika, yang dilihatnya sebagai bagian pola kegiatan Soviet di Ethiopia, Afghanistan, Pakistan dan Teluk Parsi. Impian lama Tsar Rusia yang sangat ditakuti oleh Inggris abad ke-19 hampir menjadi kenyataan.¹ Pengaruh Soviet adalah kuat di Suriah dan Irak, sedangkan Turki sejak beberapa tahun sangat kecewa dengan sekutu-sekutu Baratnya.

Kedudukan Iran adalah juga sangat penting bukan saja sebagai pengeksport minyak kedua di dunia tapi juga karena dua pertiga impor minyak dunia nonkomunis melewati Teluk Parsi dan Selat Hormuz. Negara itu penuh senjata, termasuk kapal-kapal perang modern. Bahayanya kini datang dari pergolakan dalam negeri yang tidak berakhir dengan jatuhnya rezim Shah Reza Pahlevi karena koalisi oposisi setelah berhasil pecah akibat munculnya perbedaan-perbedaan pendapat mengenai hari depan Iran dan kedudukan anggota-anggotanya. Dengan demikian terjadi suatu perebutan kekuasaan baru, yaitu antara Khomeini dan pengikut-pengikutnya di satu pihak dan golongan kiri serta golongan moderat di lain pihak. Dewan Revolusi Islam yang merupakan kekuasaan tertinggi dan juga memegang pemerintahan setelah Pemerintah Revolusioner Sementara PM Bazargan jatuh, mendapat tantangan berat, khususnya dari golongan kiri termasuk kelompok gerilya Fedayin dan banyak kelompok bersenjata lain. Selain itu Iran

¹ Lihat "The Crumbling Quickens", *Asiaweek*, 17 Nopember 1978; dan "New Stirrings in the Cauldron", *ibid.*

mengubah politik perminyakkannya dengan meningkatkan harga dan mengurangi produksi serta ekspor minyaknya sesuai dengan kebutuhan negara akan devisa. Sebagai akibat semuanya itu suplai minyak Iran menurun dan keamanannya tidak pasti. Lagi pula keamanan Selat Hormuz yang dilewati suplai minyak Teluk Parsi kini kurang terjamin. Setelah Iran menolak berfungsi terus sebagai polisi kawasan, kekuatan-kekuatan radikal menjadi lebih berani dan bisa mengganggu keamanan suplai minyak itu.¹

JALUR PELAYARAN TANJUNG HARAPAN

Juga harus dicatat bahwa sejak penutupan Terusan Suez tahun 1967 minyak Teluk Parsi diangkut dengan kapal-kapal tanki raksasa lewat Tanjung Harapan. Perdagangan lewat jalur pelayaran ini meliputi 2.300 kapal sebulan, termasuk 600 kapal tanki yang mengangkut sekitar 70% tonasenya. Bahkan setelah rencana pelebaran selesai, Terusan Suez hanya akan dilewati seperlima minyak Teluk Parsi. Dengan demikian jalur pelayaran Tanjung Harapan akan menjadi semakin penting sejalan dengan meningkatnya suplai minyak Teluk Parsi untuk Eropa Barat dan Amerika. Bahkan sekarang pun jalur pelayaran itu adalah jalur suplai minyak Eropa Barat yang paling penting karena 57% kebutuhan minyak Eropa Barat melewatinya. Demikianpun 20% kebutuhan minyak Amerika Serikat melewatinya dan angka ini akan meningkat menjadi sekitar 60% pada 1980-an.²

Suatu perkembangan baru yang harus diperhatikan oleh negara-negara Barat ialah bahwa AL Afrika Selatan telah menyarankan secara formal bahwa dia tidak sanggup memikul beban untuk melindungi pelayaran Barat itu karena sebagai akibat, embargo senjata PBB tidak mempunyai sarana-sarana untuk melakukannya. Hal itu berarti bahwa negara-negara Barat harus memikul tanggung jawab itu sendiri.

1 Lihat "Iran: At the Brink?", *Newsweek*, 13 Nopember 1978; dan "Now, Another Power Struggle", *Time*, 5 Maret 1979

2 Daan Prinsloo, *United States Foreign Policy and the Republic of South Africa* (Foreign Affairs Association, Afrika Selatan, 1978)

PENUTUP

Sebagai penutup kita dapat meringkas bahaya-bahaya yang bisa mengancam keamanan suplai minyak Barat dan pengangkutannya sebagai berikut. Pertama, kemampuan senjata, fasilitas-fasilitas udara dan laut, dan lingkungan pengaruh maupun pernyataan maksud untuk mendukung "gerakan-gerakan pembebasan" merupakan bahaya dari Uni Soviet. Kedua, jalan-jalan air buatan manusia maupun alamiah, termasuk jalur pelayaran Tanjung Harapan, kini adalah rawan. Ketiga, instalasi-instalasi lepas pantai dan kapal-kapal tanki raksasa dalam suasana sekarang ini bisa menjadi sasaran kaum teroris, dan hal ini membuat sikap negara-negara pantai sangat penting. Keempat, persetujuan Camp David menetralkan pihak-pihak utama sengketa Arab-Israel, yaitu Mesir dan Israel, tetapi juga bisa memancing aksi-aksi teroris di Libanon, Iran dan mungkin juga di Arab Saudi. Kelima, meningkatnya pengaruh Soviet di Timur Tengah bisa berarti, bahwa pada 1980-an akan ada tekanan-tekanan atas negara-negara pengekspor minyak untuk mengalihkan suplai minyak dari langganan-langganan Barat ke negara-negara Eropa Timur.

1. PEREBUTAN PENGARUH GLOBAL (Rp. 500,—):
 - Jusuf WANANDI, *Normalisasi Hubungan Amerika Serikat dengan RRC*
 - Kirdi DIPOYUDO, *Kemajuan Strategis Soviet di Etiopia, Yaman Selatan dan Afghanistan*
 - B. WIROGUNO, *Kemunduran Geopolitik Amerika Serikat di Timur Tengah*
 - O.M. SMOLANSKY, *Politik Soviet di Timur Tengah*
 - Ann T. SCHULTZ, *Politik Amerika Serikat di Timur Tengah*
 - Kirdi DIPOYUDO, *Perebutan Pengaruh atas Afrika*
2. BEBERAPA MASALAH PEMBANGUNAN (Rp. 500,—):
 - J. PANGLAYKIM, *Wiraswasta yang Sadar akan Tugas-tugasnya demi Kepentingan Bangsa dan Pendidikannya*
 - R.B. SUHARTONO, *Pembinaan dan Pengembangan Sektor Industri dalam Hubungannya dengan Sasaran Makro Repelita III*
 - Nurdjaman ARSJAD, *Demokrasi Ekonomi dalam Pembangunan*
 - Kirdi DIPOYUDO, *Pembangunan dan Perluasan Kesempatan Kerja*
3. TIMUR TENGAH DALAM SOROTAN (Rp. 500,—):
 - B. WIROGUNO, *Pergolakan di Iran dan Impaknya atas Kawasan dan Dunia*
 - Kirdi DIPOYUDO, *Peretujuan Camp David dan Prospek Perdamaian Arab-Israel*
 - Alon Ben MEIR, *Persoalan Bangsa Arab Palestina*
 - Kirdi DIPOYUDO, *Prospek Penyelesaian Masalah Libanon*
 - O. Sutomo ROESNADI, *Hubungan Antara Indonesia dan Timur Tengah*
4. PERATAAN PENDAPATAN (Rp. 500,—):
 - Kirdi DIPOYUDO, *Perataan Pendapatan suatu Kewajiban Dasar Negara*
 - A. Rahman RANGKUTI, *Peranan Inmas dan Bimas dari Segi Pemerataan Pembangunan*
 - Hadi SOESASTRO, *Distribusi Konsumsi, Efek Subsidi dan Efek Penyesuaian Harga Minyak Tanah di Sektor Rumah Tangga*
 - H. CAROKO, *Masalah Perluasan Kesempatan Kerja*
 - R. Slamet ROOSMAN, *Pembangunan di Irian Jaya*
5. FOKUS ATAS AFRIKA (Rp. 500,—):
 - Basil DAVIDSON, *Suatu Tertib Baru di Afrika*
 - B. WIROGUNO, *Tendensi-tendensi di Afrika Dewasa Ini*
 - M. SUDIBJO, *Konflik-konflik di Tanduk Afrika*
 - Kirdi DIPOYUDO, *Nigeria Negara Terkemuka Afrika Kulit Hitam*
 - B. WIROGUNO, *Pertarungan di Afrika Timur Laut*
 - W.C.J. van RENSBURG, *Afrika dan Tali-tali Penyelamat Barat*
6. PERJUANGAN DUNIA BARU (Rp. 500,—):
 - Jan TINBERGEN dan Anthony J. DOLMAN, *Dari Kekacauan Dunia Menuju Tata Internasional*
 - *Dialog Utara-Selatan: Segi Politik dan Ekonomi Tata Ekonomi Internasional Baru*
 - Karl BRUNNER, *Tata Ekonomi Internasional Baru: Suatu Konfrontasi yang Berkepanjangan*
 - Kirdi DIPOYUDO, *Neokolonialisme Lawan Tata Ekonomi Dunia Baru*
 - J. PANGLAYKIM, *Akses ke Pasar Jepang: Suatu "Mission Impossible?"*
7. PERANG MELAWAN KEMISKINAN (Rp. 500,—):
 - Mahbub ul HAQ, *Menuju Perang Melawan Kemiskinan Massa*
 - S. Sunarto NDARU MURSITO, *Meningkatkan Pendapatan Sektor Pertanian di Indonesia*

- Nancy Kumalasari RUSTANDI, *Pengaruh Kredit Canda Kulak terhadap Masyarakat Pedesaan*
 - Murwatie B. RAHARDJO, *Meningkatkan Transmigrasi Sebagai Usaha Memerantas atau Mengurangi Kemiskinan*
 - L. HARIANDJA, *Pendidikan Faktor Utama Pembinaan Rakyat Miskin*
8. ASIA TENGGARA BERGOLAK (Rp. 500,—):
- Kirdi DIPOYUDO, *Konflik Kamboja-Vietnam dan Akar-akarnya*
 - Endi RUKMO, *Pengungsi Indocina: Latar Belakangnya, Akibatnya di Negara-negara ASEAN dan Usaha Penyelesaiannya*
 - J. PANGLAYKIM, *Industri Perbankan ASEAN: Sebuah Tinjauan Kualitatif*
 - Ronald NANGOI, *Hubungan Perdagangan ASEAN — Australia*
 - Asnani USMAN, *Masalah Batas Landas Kontinen Indonesia — Vietnam*
9. STRATEGI PEMBANGUNAN DITINJAU KEMBALI (Rp. 500,—):
- Kirdi DIPOYUDO, *Satu Generasi Pembangunan di Asia*
 - Mahbub ul HAQ, *Perspektif-perspektif Baru tentang Pembangunan*
 - Maurice J. WILLIAMS, *Pemenuhan Kebutuhan-kebutuhan Dasar Manusia: Waktu untuk Aksi Bersama*
 - Colin NORMAN, *Teknologi untuk Menciptakan Kesempatan Kerja Massal*
 - Pande Radja SILALAH, *Suatu Tinjauan tentang Sistem Ekonomi Indonesia*
10. MENANJAKNYA DAN PROSPEK KAWASAN PASIFIK (Rp. 500,—):
- William H. OVERHOLT, *Munculnya Kawasan Pasifik Sebagai Pusat Dinamisme Dunia*
 - Jusuf WANANDI, *Analisa Mengenai Pasifik Barat Dalam Tahun 1980-an*
 - Hadi SOESASTRO, *Interdependensi Ekonomi di Asia-Pasifik Dalam Tahun 1980-an*
 - R. Slamet ROOSMAN, *Papua New Guinea dan Prospek Peningkatan Hubungan dengan Indonesia*
 - R. Slamet ROOSMAN, *Keturunan Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan*
11. MENUJU PEMBAHARUAN PENDIDIKAN NASIONAL (Rp. 500,—):
- Burton R. CLARK, *Arti Organisasi Pendidikan Jaman Modern*
 - Onny S. PRIJONO, *Suatu Perspektif Mengenai Sistem Pendidikan Nasional Indonesia*
 - William K. FRANKENA, *Pendidikan Moral Ditinjau dari Sudut Filsafat*
 - Rio TAMBUNAN, *Bermain dan Berprestasi*
 - A. Sudiharto DJIWANDONO, *Pemerataan Pendidikan Menuju Realisasi Asas Keadilan Sosial*
12. AKTUALITAS INTERNASIONAL (Rp. 500,—):
- Ali MOERTOPO, *Konfigurasi Negara-negara Besar di Kawasan Asia-Pasifik*
 - Jusuf WANANDI, *Arah Kebijakan Amerika Serikat di Asia-Pasifik di Masa Mendatang*
 - B. WIROGUNO, *Maksud dan Arti Pendudukan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Iran dan Opsi-opsi Pemerintah Carter*
 - Jusuf WANANDI, *Hubungan Jepang-Indonesia dalam Rangka Keamanan dan Kemakmuran Asia-Pasifik*
 - Michael B. SOEBAGYO, *Afghanistan Ujung Tombak Strategi Uni Soviet ke Samudera Hindia*
 - Edgar O'BALLANCE, *Nilai Jalur Pelayaran Tanjung Harapan bagi NATO*